

Tahun  
**2024**

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar  
Badan Penelitian Pengembangan dan  
Perencanaan



# LAKIP

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah



bappedalitbang@polmankab.go.id



Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Mandar

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Balitbangren pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tergambar pada pencapaian Kinerja Balitbangren.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Balitbangren memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan. Uraian tingkat ketrecapaian dan ketidak capaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

## SASARAN STRATEGIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

| No | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target Kinerja Sasaran |                     | Realisasi        | Tingkat Capaian (%) |
|----|---|--|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|    |   |  | Nilai                  | Tahun 2024          |                  |                     |
| 1  | Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah           | Percentase perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu | Persen                 | 100                 | 100              | 100                 |
| 2  | Meningkatnya kualitas inovasi daerah                          | Indeks Inovasi Daerah  | Indeks                 | Inovatif (30.00)    | Inovatif (45.32) | 151.06              |
| 3  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah                               | Indeks                 | Sangat Baik (88.31) | Baik             | 99,53               |
|    |   | Predikat SAKIP Perangkat Daerah  | Predikat               | A (80)              | A (85.12)        | 106.25              |
|    |   | Percentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah                         | Persen                 | 100                 | 100              | 100                 |

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis(Renstra) tahun 2019-2024. LAKIP Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LAKIP Balitbangren dibuat sebagai bentuk komitmen guna terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Polewali Mandar, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,efektif, dan efisien.

Rencana kinerja Tahun 2024 ini ditetapkan dalam pencapaian 3 (tiga) sasaran startegis dan 5 (lima) indikator kinerja, LAKIP ini disajikan dalam 4 (empat) Bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Perencanaan Kinerja, Bab Akuntabilitas Kinerja dan Bab Penutup.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja Balitbangren pada tahun 2024.

Polewali, 15 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Badan Penelitian,  
Pengembangan dan Perencanaan,**



**Andi Himawan Jasin, ST. M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 197502152005021002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

# Daftar Isi

## BAB I : PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. LATAR BELAKANG                                     | 01 |
| B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | 05 |

## BAB II : PERJANJIAN KINERJA

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. RENCANA STRATEGIS            | 11 |
| B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 | 15 |

## BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. AKUNTABILITAS KINERJA  | 18 |
| B. AKUNTABILITAS KEUANGAN | 58 |

## BAB IV : PENUTUP

|         |    |
|---------|----|
| PENUTUP | 61 |
|---------|----|

## LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024  | 65  |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024             | 66  |
| POHON KINERJA TAHUN 2024                  | 92  |
| PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 | 99  |
| MONITORING DAN EVALUASI RENJA TAHUN 2024  | 102 |
| LAPORAN EVALUASI INTERNAL TAHUN 2024      | 101 |

# Daftar Gambar & Grafik

|   |    |
|---|----|
| 1. Gambaran Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan .....   | 07 |
| 2. Gambar Jadwal Kegiatan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 .....  | 25 |
| 3. Grafik Perbandingan realisasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 .....          | 26 |
| 4. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 1) .....   | 31 |
| 5. Grafik Perbandingan realisasi indeks inovasi daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 .....  | 37 |
| 6. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 2) .....   | 39 |
| 7. Grafik Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 ..... | 44 |
| 8. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (indikator 3) .....   | 47 |
| 9. Grafik Perbandingan realisasi kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 .....                            | 49 |
| 10. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 4) .....  | 51 |
| 11. Grafik Perbandingan realisasi kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 .....    | 54 |
| 12. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 5) .....  | 56 |

# Daftar Tabel

|  |    |
|--|----|
| 1. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019–2024 .. | 14 |
| 2. Tabel Program dan Alokasi anggaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 .....                   | 17 |
| 3. Tabel Realisasi Indokator Utama (IKU) 2024 .....  | 21 |
| 4. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....  | 22 |
| 5. Tabel Jenis dokumen perencanaan yang disusun Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 .....         | 25 |
| 6. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (indikator 1) .....                     | 27 |
| 7. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 1) .....                    | 29 |
| 8. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 2).....                      | 38 |
| 9. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2) .....                    | 38 |
| 10. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2) .....                   | 39 |
| 11. Tabel Hasil Survei Kepuasan Layanan berdasarkan jenis layanan dirinci per unsur layanan .....                      | 43 |
| 12. Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....                     | 44 |
| 13. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 3) .....                    | 45 |
| 14. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 3) .....                   | 46 |
| 15. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 4) .....                    | 50 |
| 16. Tabel Program, kegiatan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 4) .....                       | 51 |
| 17. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 5) .....                    | 56 |
| 18. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 5) .....                   | 55 |
| 19. Tabel Efisiensi Akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun 2024 .....  | 59 |
| 20. Tabel Realisasi Anggaran 2024.....   | 60 |



# L A K I P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
**Tahun 2024**



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar  
Badan Penelitian Pengembangan  
dan Perencanaan



# BAB I

ishak\_sirannapooi

# PENDAHULUAN



# A. LATAR BELAKANG

BAB I  
Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Badan Penelitian pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi daerah. Akuntabilitas salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi Pemerintah ditingkat pusat dan daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Balitbangren sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Polewali Mandar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban Balitbangren untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).



# I.DASAR HUKUM

Dokumen LAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendaya gunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024;
- Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;
- Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2024 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.



## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

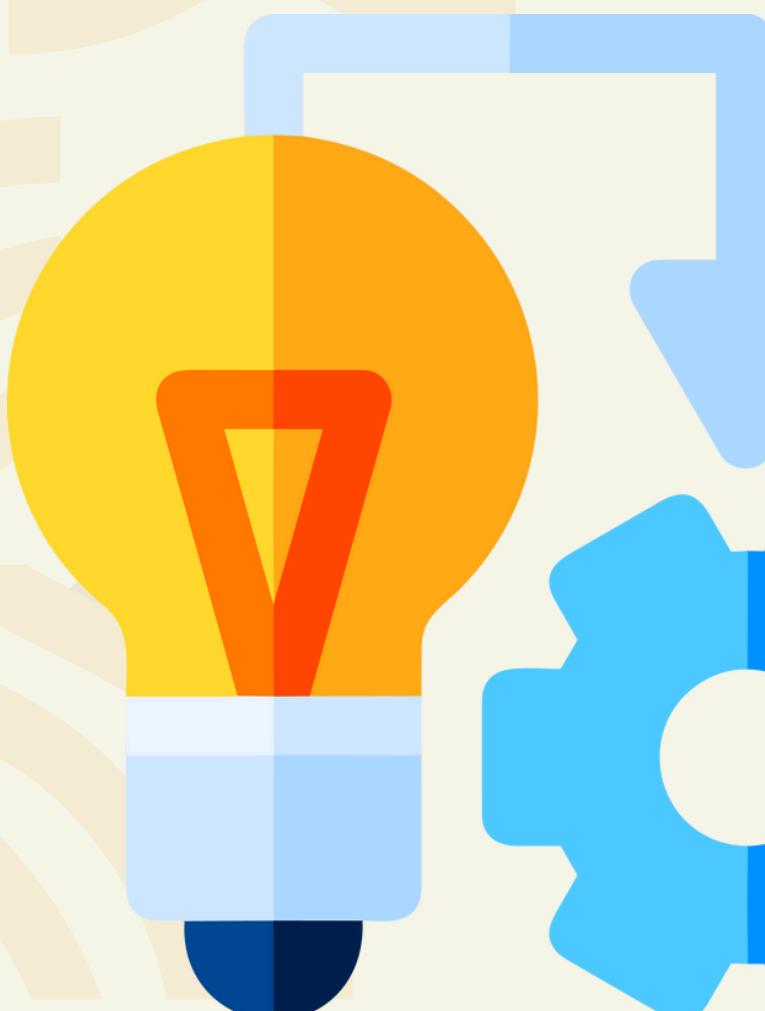
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 adalah:

### 2.1 Maksud Laporan

- Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Sebagai parameter penilaian kinerja Perangkat Daerah; Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya;
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik di bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan;
- Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah pada periode kerja selanjutnya;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya;
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

### 2.2 Tujuan Laporan

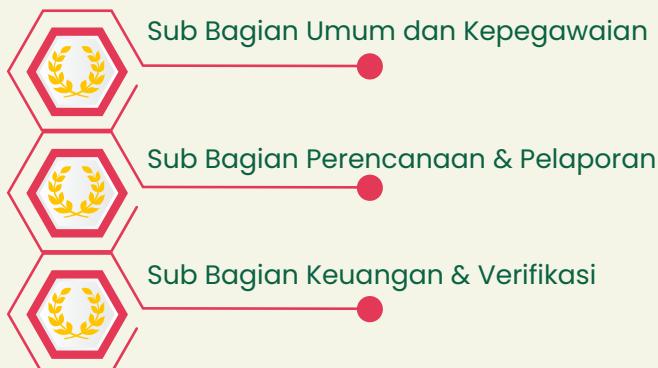
- Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Balitbangren kepada Bupati;
- Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Balitbangren;
- Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Balitbangren.



# B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK & FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

## SEKRETARIAT



# KEPALA BADAN

## BID EKONOMI



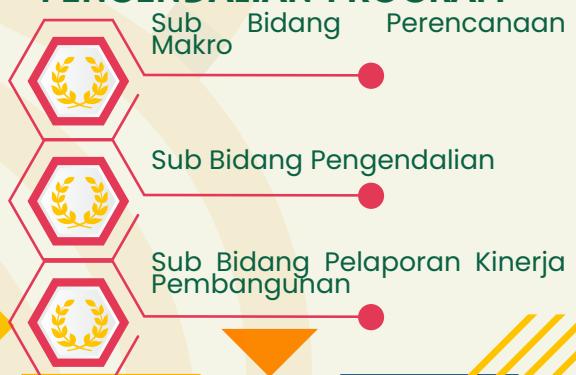
## BID SOSIAL & BUDAYA



## BID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH



## BID PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM



# I.TUGAS POKOK & FUNGSI

Berdasarkan peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, kedudukan Balitbangren adalah unsur penunjang tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang penelitian pengembangan dan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Balitbangren sebagai berikut:

## TUGAS POKOK

**Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan yang menjadi kewenangan daerah**

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas



Serta berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan dibentuk UPTD Agro Techno Park sebagai fungsi penunjang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.

# GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI



## 2. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mandasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Balitbangren yang membantu Kepala Daerah dalam fungsi Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan masih menghadapi

beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Perubahan Regulasi/Peraturan Perundangan

Sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 beberapa regulasi/peraturan perundangan yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit baik diawal, pertengahan maupun akhir tahun rencana (Implementasi aplikasi SIPD Kemendagri). Beberapa diantaranya: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- Belum maksimalnya penyebarluasan sistem pengelolaan knowledge

Belum maksimalnya penyebarluasan sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Balitbangren secara terintegrasi. Produk Balitbangren yang tersedia di website Balitbangren dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan stakeholder sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik.

- Belum maksimalnya penyebarluasan sistem pengelolaan knowledge

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan belum melakukan kajian mendalam Penyebabnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

- Belum maksimalnya pengawalan perencanaan sampai ke tahap penganggaran

Rencana kerja perangkat daerah yang telah disusun pada tahapan perencanaan tidak berjalan konsisten sampai pada tahap penagnggaran diakibatkan oleh banyaknya kebijakan dan

pembahasan dengan pihak legislatif serta pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD yang belum maksimal dalam pengelolaannya. Sehingga pada tahap penganggaran banyak yang tidak sesuai dengan rencana

### 3. Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 yang merupakan bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, disusun berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

### 4. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 5.472.427.548,07,- Jumlah Belanja Operasi Rp. 5.462.555.208,07,- dan Belanja Modal Rp. 9.872.340,-

## 5. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 ini terdiri dari empat (4) bab sebagai berikut:





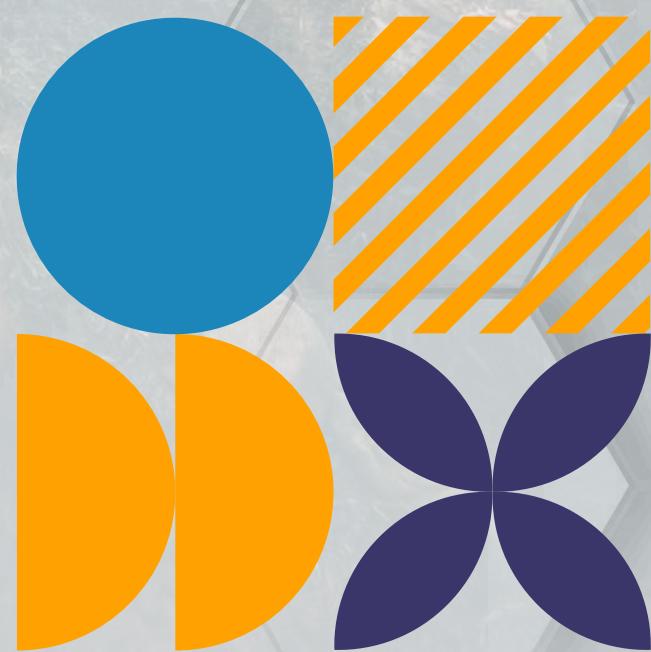
**L A K I P**  
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
**Tahun 2024**



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar  
Badan Penelitian Pengembangan  
dan Perencanaan

## BAB II

# PERJANJIAN KINERJA



# A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen Renstra memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang realistik dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

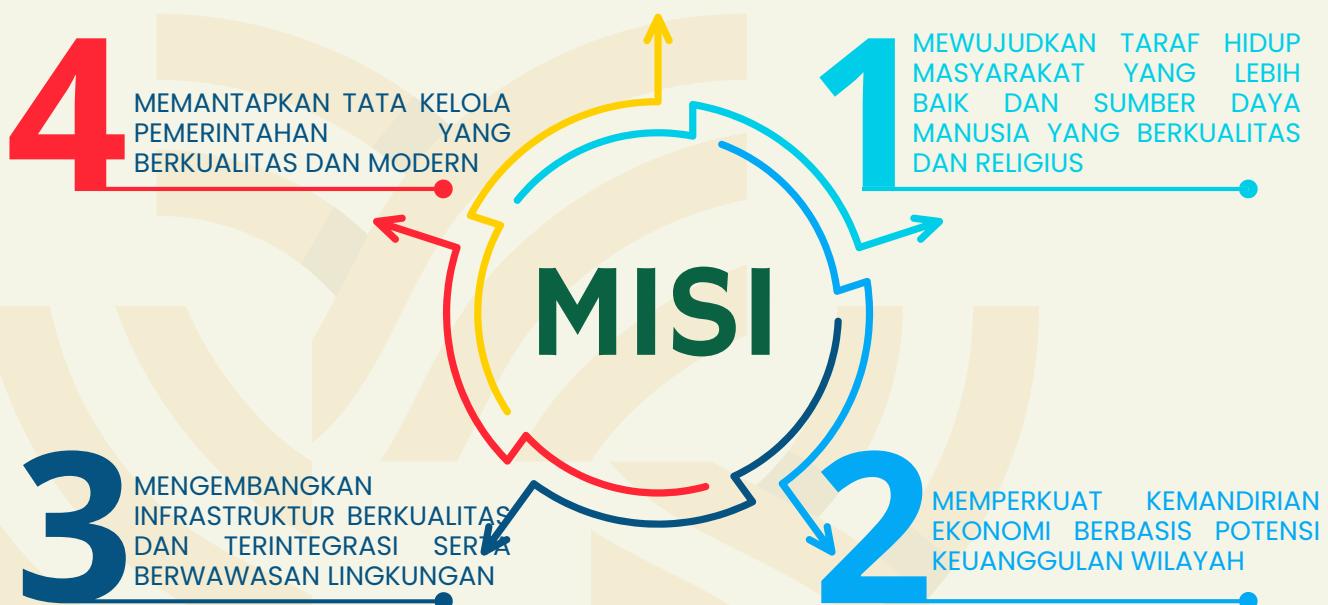
## BAB II PERJANJIAN KINERJA



Dokumen perencanaan strategis tingkat SKPD berupa dokumen Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan tingkat kabupaten berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah :

# VISI POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA



# TUJUAN

“  
**Terwujudnya  
Pemerintahan Yang  
Bersih, Akuntabel  
dan Modern**  
”

# SASARAN

- 1 Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
- 2 Meningkatnya kualitas inovasi daerah
- 3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024. Dari Visi dan 4 (empat) Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, visi yang relevan dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar adalah pada misi 4 yaitu **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern”**.

## I.TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Mengacu kepada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019–2024 adalah **“Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern”**

## 2. SASARAN

Belum maksimalnya penyebarluasasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkatdaerah. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Adapun sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud , maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C, yaitu : specific (jelas), measureable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan indikator dilevel impact (dampak). Indikator sasaran strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Disamping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama).

**Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024**

| TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | SATUAN   | 2019     | 2020     | 2021        | 2022        | 2023        | 2024            |
|--|---|---|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Akuntabel dan Modern |   | Indeks Reformasi Birokrasi  | Nilai    | 62       | 66       | 71          | 75          | 81          | 86              |
|  | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah | Percentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standart dan tepat waktu | Persen   | 100      | 100      | 100         | 100         | 100         | 100             |
|  | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                | Indeks Inovasi Daerah   | Persen   | Inovatif | Inovatif | Inovatif    | Inovatif    | Inovatif    | Sangat Inovatif |
|  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah  | Nilai    | Baik     | Baik     | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik     |
|  |   | Predikat SAKIP Perangkat Daerah   | Predikat | BB       | BB       | A           | A           | A           | A               |
|  |   | Percentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah                                  | Persen   | 100      | 100      | 100         | 100         | 100         | 100             |

## A.I Penetapan Indikator Kinerja Utama

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar serta RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024. adapun Indikator Kinerja Utama Balitbangren ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Utama Balitbangren Tahun 2024**

| No | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target Kinerja Sasaran Satuan |                     | Realisasi         | Tingkat Capaian (%) |
|----|---|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|    |   |  | Nilai                         | Tahun 2024          |                   |                     |
| 1  | Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah           | Persentase perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu | Persen                        | 100                 | 100               | 100                 |
| 2  | Meningkatnya kualitas inovasi daerah                          | Indeks Inovasi Daerah  | Indeks                        | Inovatif (30.00)    | Inovatif (45.32)) | 151.06              |
| 3  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah                               | Indeks                        | Sangat Baik (88.31) | Baik              | 99,53               |
|    |   | Predikat SAKIP Perangkat Daerah  | Predikat                      | A (80)              | A (85.12)         | 106.25              |
|    |   | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah                         | Persen                        | 100                 | 100               | 100                 |

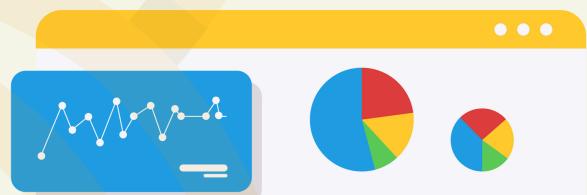
# B. PENETAPAN KINERJA

## TAHUN 2024

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Penetapan kinerja tersebut merupakan tekad dan janji antara Pimpinan Instansi unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah terhadap atasan langsungnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, namun kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup out come yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya demi terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahun.

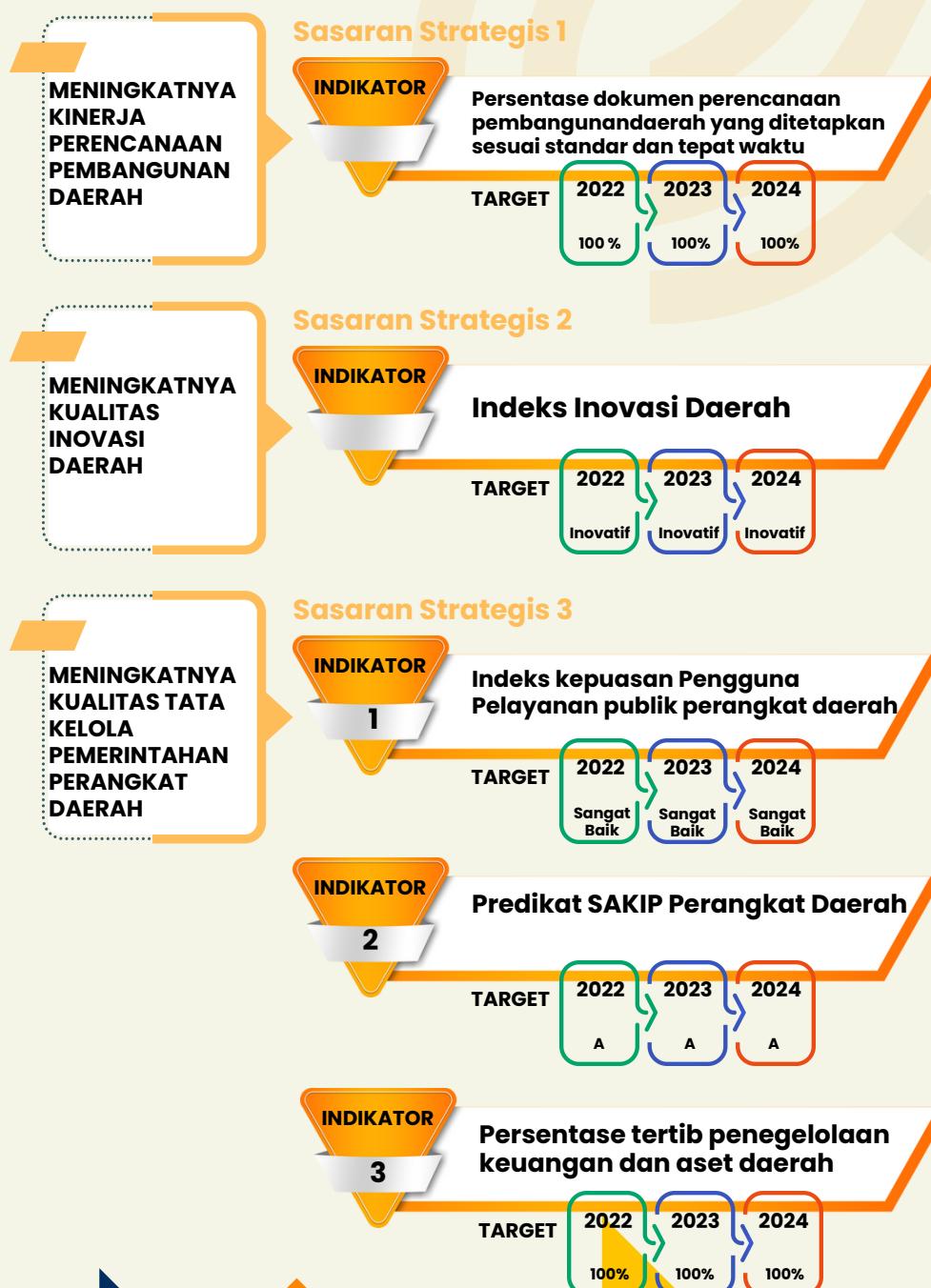
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai



Penetapan kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun isi dari perjanjian kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga)sasaran, 5 (lima) Indikator, dengan rincian sebagai berikut:



Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.5.472.427.548,07 anggaran tersebut direalisasikan ke seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan.

**Tabel Program dan Alokasi anggaran  
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024**

| SASARAN  | PROGRAM YANG MENDUKUNG<br>PENCAPAIAN SASARAN                       | ANGGARAN                    | PERSENTASE |
|--|--|-----------------------------|------------|
| <b>Menigkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>              | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 335.797.221,10          | 6,13       |
| <b>Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah</b>                              | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  |                             |            |
| <b>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</b>                            | Program Penelitian dan Pengembangan                                | Rp. 1.069.999.675,97        | 19,55      |
| <b>Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah</b> | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten               | Rp. 3.511.878.216           | 64,18      |
| <b>Jumlah</b>  |  | <b>Rp. 5.472.427.548,07</b> |            |



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar  
Badan Penelitian Pengembangan  
dan Perencanaan

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

L A K I P  
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
**Tahun 2024**

# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA

## A AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal ini sesuai dengan amanah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalmnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Pertanggung jawaban Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Yang berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi :

- Pencapaian sasaran organisasi;
- Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan
- Pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program /kegiatan/ sub kegiatan, dan persentase realisasi anggaran perprogram/ kegiatan/ subkegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja mencakup 4 (empat) unsur utama, yaitu :

- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Target outcome yang dietapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai
- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir.
- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

## A.I Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan atau kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil
2. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil
3. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil
4. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perencanaan dan Penelitian secara umum realiasi atas target yang telah ditetapkan adalah 109.29%. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini.

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas.

Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang melalui Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja. Untuk setiap sasaran yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Indikator Utama (IKU) 2024**

| No | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Cara perhitungan indikator Sasaran  | Target Kinerja Tahun 2024 |                     | Realisasi        | Tingkat Capaian |
|----|---|--|---|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|    |   |  |   | Sasaran                   | Satuan              |                  |                 |
| 1  | Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah             | Percentase dokumen pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu | Jumlah Percentase dokumen pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dibagi dengan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan dikali 100                | Persen                    | 100                 | 100              | 100             |
| 2  | Meningkatnya kualitas inovasi daerah                            | Indeks Inovasi Daerah  | Hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah divalidasi oleh Badan Litbang Kemendagri melalui proses penjaminan mutu dan UKKPPM  | Indeks                    | Inovatif (30,00)    | Inovatif (45,32) | 151,06          |
| 3  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah                           | Jumlah indeks kepuasan stakeholder atas survei kepuasan pelayanan publik yang dilakukan perangkat daerah secara berkala dibagi dengan jumlah jenis pelayanan perangkat daerah yang dilakukan survei | Indeks                    | Sangat baik (88,31) | Baik             | 99,53           |
|    |   | Predikat SAKIP Perangkat Daerah  | Hasil Review Inspektorat atau implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah  | Predikat                  | A (80)              | A (85,12)        | 106,25          |
|    |   | Percentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah                     | Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dibagi dengan jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan set  | Persen                    | 100                 | 100              | 100             |

## A.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 Terhadap target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerjatahun terakhir periode Renstra 2019-2024 untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Dari tabel dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja tercapai setiap tahunnya, Tahun 2022, 2023, 2024 dengan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024**

| No | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Satuan   | Realisasi        |                  |                  |                  |
|----|---|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |   |  |          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 1  | Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah           | Persentase perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu | Persen   | 66,67            | 100              | 100              | 100              |
| 2  | Meningkatnya kualitas inovasi daerah                          | Indeks Inovasi Daerah  | Indeks   | Inovatif (35,91) | Inovatif (43,67) | Inovatif (41,64) | Inovatif (45,32) |
| 3  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah                               | Indeks   | Baik (87,96)     | Baik (86,33)     | Baik (86,84)     | Baik (87,96)     |
|    |   | Predikat SAKIP Perangkat Daerah  | Predikat | A (83,64)        | A (86,59)        | A (85,12)        | A (85,12)        |
|    |   | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah                         | Persen   | 100              | 100              | 100              | 100              |

## A.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada analisis capaian kinerja membahas pencapaian formulasi dan cara perhitungan dalam memperoleh realisasi indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

## A.3.I Sasaran Strategis I (Satu)

MENINGKATNYA KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR

Percentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan yaitu : RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dimana ketiga dokumen perencanaan pembangunan tersebut saling berkaitan, dalam menyusun RPJMD pemerintah daerah mengacu pada RPJPD, sedangkan untuk penyusunan RKPD (dokumen perencanaan 1 tahunan) mengacu pada dokumen RPJMD. Setiap penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa tahapan perencanaan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yang meliputi rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Tahapan tersebut meliputi :

- Penyusunan Rancangan awal
- Perumusan Rancangan
- Pelaksanaan Musrenbang
- Perumusan Rancangan Akhir
- Penetapan Rencana

Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan daerah ditandai dengan terlaksananya setiap tahapan-tahapan perencanaan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka :

- Menghasilkan dokumentasi perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku
- Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan
- Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian melalui pencapaian indikator kinerja.

### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

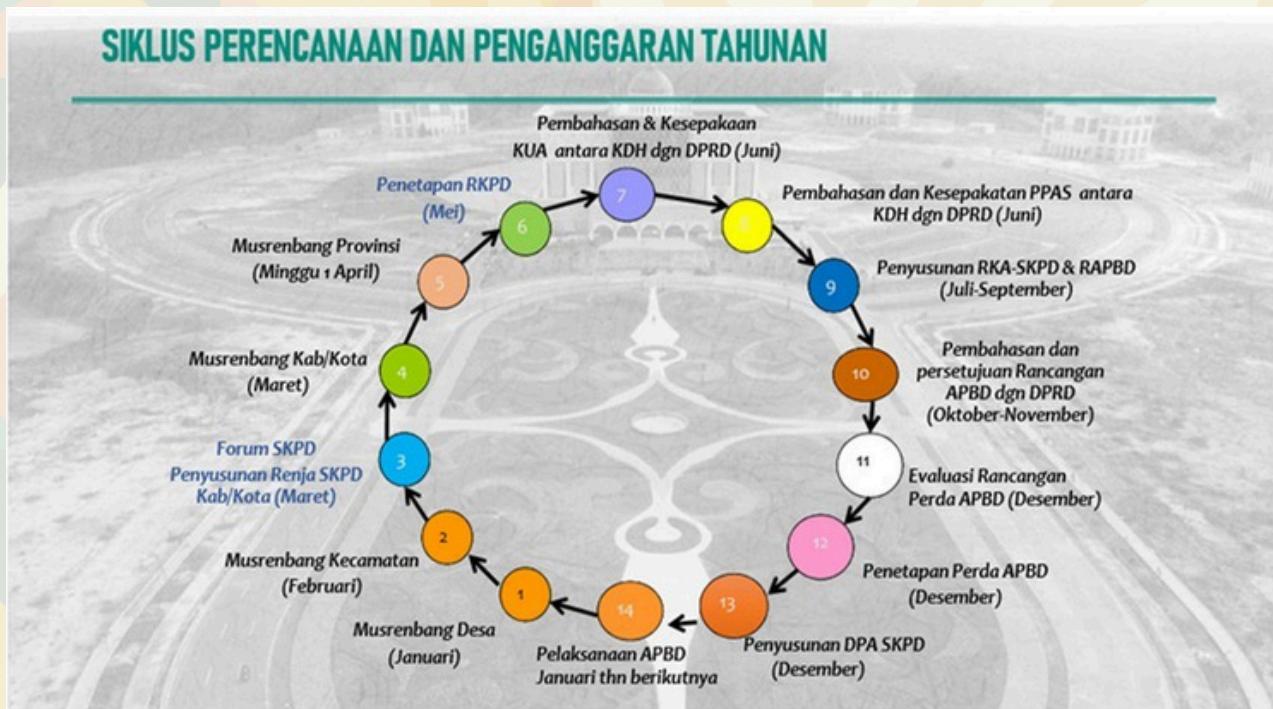
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah ditandai dengan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari dokumen perencanaan jangka panjang (dokumen RPJPD), dokumen perencanaan jangka menengah (dokumen RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan (dokumen RKPD) sesuai standar yang meliputi kaidah-kaidah penyusunan dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan IKU Tahun 2019-2024 indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar ketentuan penyusunan dan tepat waktu dengan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan.

Beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan di tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 yaitu :

1. Dokumen RKPD Tahun 2025 yang merupakan dokumen tahunan yang wajib untuk disusun setiap tahunnya
2. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024 yang merupakan dokumen tahunan yang wajib untuk disusun setiap tahunnya.

## Gambar Jadwal Kegiatan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024



Jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Jenis dokumen perencanaan yang disusun  
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024**

| No | Nama Dokumen              | Regulasi                             | Tanggal         |
|----|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|    |                           |                                      | Pengesahan      |
| 1  | RKPD Tahun 2025           | Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 | 5 Juli 2024     |
| 2  | RKPD Perubahan Tahun 2024 | Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 | 13 Agustus 2024 |

Dari kedua dokumen perencanaan tersebut seluruhnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan dan telah sesuai dengan tahapan. Sehingga persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut :

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan

$$= \frac{2}{2} \times 100 \\ = 100$$

**X 100**

Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah** dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

**Target 2024**  
100%

**Realisasi 2024**  
100%

**Capaian 2024**  
100%

**Kategori Sangat Berhasil**

#### B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Perbandingan penyusunan capaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dalam kurun waktu 4 (tahun) terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik Perbandingan realisasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024

Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian capaian tahun sebelumnya tahun 2024 mengalami setara dengan kategori sangat berhasil.

Perbandingan capaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (indikator I)**

| Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 | Target Akhir Renstra (%) 2024 | Capaian % 2024 terhadap target 2024 |
|---|--|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100%        | 100%           | 100%         | 100%                          | 100%                                |

## C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

|  |   |
|--|---|
| <b>Faktor Penunjang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengawali seluruh tahapan perencanaan sehingga dokumen tersusun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan</li> <li>↳ Adanya regulasi terkait tahapan/jadwal perencanaan sampai penganggaran sehingga setiap aktivitas jelas dan terukur</li> <li>↳ Adanya kepatuhan dan komitmen serta ketertiban seluruh Perangkat Daerah, stakeholder dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>↳ Tersedianya dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan</li> </ul> | <b>Faktor Penghambat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pada tanggal 27 Desember 2021 yang wajibkan pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam bentuk verifikasi, validasi dan inventarisasi pada aplikasi SIPD</li> <li>↳ Padatnya jadwal tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) di Tahun 2024 menyebabkan kurang maksimalnya peran dan fungsi Balitbangren</li> </ul> |
|--|---|

## Solusi

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pusadatin Kemendagri dan Badan Keuangan terkait regulasi kepemdagri yang terbit di tahapan penganggaran
- Menyusun jadwal dan tahapan proses perencanaan secara terstruktur untuk meminimalisir padatnya agenda kegiatan serta melakukan pembagian peran secara maksimal

Dalam hal kesesuaian dengan aturan yang berlaku, penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada beberapa regulasi diantaranya :

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu pada tahun 2024 yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 4 kegiatan, 10 sub kegiatan
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 kegiatan, 18 sub kegiatan Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator I)**

| Program  | Indikator Kinerja  | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                              | <i>Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD</i>   | 100 %     | 100%      | 100         |
| Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | <i>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan</i>  | 3 Laporan | 3 Laporan | 100         |
| Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                    | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)          | 1 Laporan | 1 Laporan | 100         |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Jumlah berita acara konsultasi publik  | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                          | Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah   | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota  | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan  | Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan  | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)            | 2 Laporan | 2 Laporan | 100         |
| Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah   | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah          | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi  | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | <i>Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan</i>            | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota       | Jumlah Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                  | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah        | <i>Jumlah laporan hasil implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i> | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah       | Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola          | 1 laporan | 1 laporan | 100         |

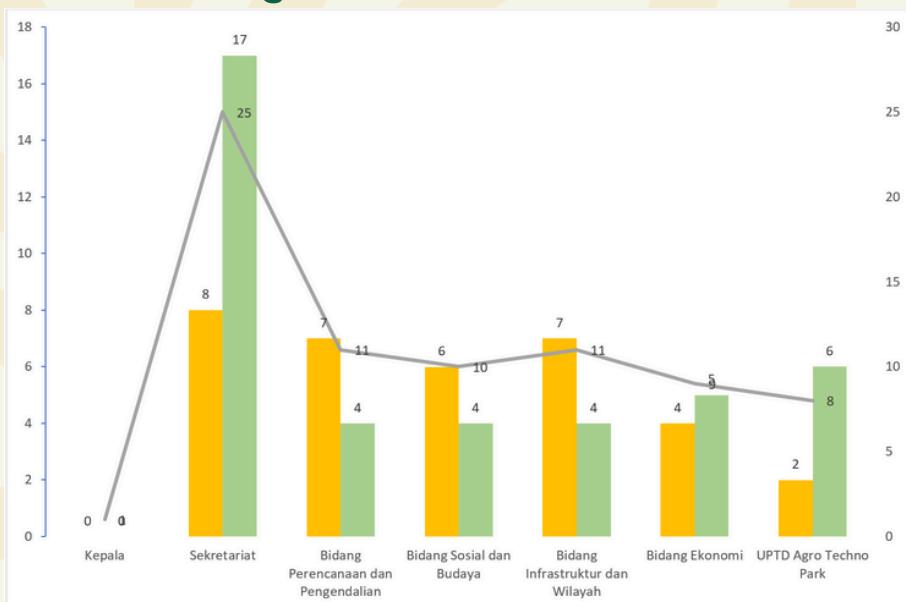
| Program  | Indikator Kinerja   | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|--|---|-----------|-----------|-------------|
| Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | <i>Persentase Keselarasan Program OPD Pada Bidang Sosial Budaya Antara RPJMD Dengan RENSTRA Pada Perangkat Daerah</i>           | 100%      | 100%      | 100         |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan   | <i>Jumlah Laporan Kesesuaian Renstra/Renja Perangkat Daerah Dengan RPJMD/RKPD Bidang Sosial Budaya</i>                          | 6 Laporan | 6 Laporan | 100         |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)        | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia           | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia | Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia   | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)  | <i>Jumlah Laporan Kesesuaian Renstra/Renja Perangkat Daerah Dengan RPJMD/RKPD Bidang Ekonomi</i>                                | 6 Laporan | 6 Laporan | 100         |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)        | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                  | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian        | Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian          | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)                 | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA manusia                                   | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA manusia         | Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                   | 1 laporan | 1 laporan | 100         |

| Program  | Indikator Kinerja  | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  | Jumlah Laporan Kesesuaian Renstra/Renja Perangkat Daerah Dengan RPJMD/RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayah                    | 6 Laporan | 6 Laporan | 100         |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <b>Infrastruktur</b> Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <b>Infrastruktur</b>           | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <b>Infrastruktur</b>   | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)            | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA manusia                             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah                      | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA           | Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah              | 1 laporan | 1 laporan | 100         |

## E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah:

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator I)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja Sekretariat yang jumlah 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani 8 (delapan) pegawai ditambah 17 Tenaga kontrak. Bidang Perencanaan dan Pengendalian program yang jumlahnya 11 (sebelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Bidang Sosial Budaya yang jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 6 (enam) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak. Bidang Ekonomi yang jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 6 (enam) pegawai ditambah 11 (sebelas) tenaga kontrak. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang jumlahnya sebanyak 11 (sebelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 4 (lima) tenaga kontrak. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah sesuai target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp. 335.797.221,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 306.695.555-atau 91,33 %. dan Rp. 890.549.655,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 756.200.012 atau 84.91 %.

**Foto Forum Perangkat Daerah 2024**



**Foto Musrenbang Kecamatan 2024**



**Foto Musrenbang Kabupaten 2024**



**Foto Rapat Monev Pembangunan TW 2024**



## A.3.2 Sasaran Strategis 2 (Dua)



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah dan penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Dalam penilaian tersebut proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah melalui seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan /atau insentif inovasi daerah.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah

Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui :

- Peningkatan pelayanan publik Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- Peningkatan daya saing daerah

Bentuk inovasi daerah berupa :

- Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Inovasi pelayanan publik Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Kriteria inovasi daerah :

- Mengandung pembaharuan seluruh atau sebahagian unsur dari inovasi
- Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat
- Tidak mengakibatkan pembebanan dan /atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan
- Dapat direplikasi

## A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Badan Penelitian Pengembangan dan perencanaan (Balitbangren) ditunjuk sebagai pembina inovasi daerah untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar karena tugas pokok dan fungsinya selain mengurusi urusan perencanaan juga mengurusi urusan penelitian. Urusan penelitian dan pengembangan ini juga termasuk urusan fungsi penunjang. Balitbangren selaku Pembina inovasi daerah memiliki tugas untuk menghimpun seluruh bentuk- bentuk inovasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar melalui seluruh perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong penerapan good governance dalam tata kelola Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya kemudian tujuan akhir menjadikan Kabupaten terinovatif dalam ajang IGA (Innovative Government Award).

Perjalanan IGA Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini merupakan tahun keempat dilakukan karena perjalanan IGA sebelumnya di tahun 2019 dan 2020 masih di level belum dapat dinilai karena Balitbangren tidak melakukan penginputan inovasi daerah di tahun tersebut akibat tidak adanya informasi terkait indeks inovasi daerah. Namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ini kabupaten Polewali Mandar melalui Balitbangren

sudah memulai penginputan indeks inovasi. Tahun 2024 Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan kategori inovatif dengan skor indeks 45,32 dengan rangking 212 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024.

Meningkatnya kualitas inovasi daerah ditandai dengan pencapaian inovasi daerah melalui penilaian indeks inovasi berdasarkan indikator indeks inovasi, persyaratan pengisian indeks inovasi, dan variable penilaian indikator lainnya. Data inovasi daerah yang dimasukkan oleh perangkat daerah yaitu :

- GERTAK EKSTREM 2024 (Gerakan Tanpa Kemiskinan Ekstrem 2024)
- SI PETANI TAMPAN (Sistem Pertanian Terpadu, Terintegrasi, Mandiri, Partisipatif dan Modern)
- UGD STUNTING (Updating Geospasial Data Stunting)
- DESAK PBB (Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi Bangunan)
- ASPRI DANA ONLINE (Aplikasi Surat Perintah Pencarian Dana Online)
- SIMPEG INTEGRASI (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
- SIMKP INTEGRASI (Sistem Informasi Kinerja Pegawai)
- SI POLOS (Sistem Informasi Prosedur Pelayanan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan)

- Pasar Online Pekkabata
- SIAAPma' (Sistem Informasi Aplikasi Permukiman)
- AFF (Aplikasi Fermentasi Fermifan) di Tambak
- Pasar Kerja Online Polewali Mandar
- LTSA PP PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia) Kab. Polewali Mandar
- RUANG KOPASSUS IMB (Ruang Konsultasi dan Pengaduan Teknis Khusus IMB)
- Digitalisasi Berbasis Video Infografis
- Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan
- Digitalisasi Pengarsipan Dokumen Organisasi Perangkat Daerah
- DUM DUUM (Darah Untuk Kemanusiaan Darah Untuk Ibu Melahirkan)
- Sipamandaq Kawal Ibu Hamil
- POSTER JAGO (Posyandu Terintegrasi Menuju Generasi Berdaya Saing Global)
- JAGO TARI (Jumat Ingat Obat Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri)
- SCMU (Social Care Mobile Unit)
- SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)
- PULSA DATA GOOGLE DRIVE (Kumpul dan Simpan Data Secara Digital dengan Aplikasi Google Drive)
- THE KING (KIR Online Jago) Pengujian Kendaraan berbasis BLUE (Bukti Lulus Ujian Elektronik) didukung Aplikasi Digital Secara Online
- Pemupukan Spesifik dengan Menggunakan Perangkat Uji Tanah Kering
- MPKH (Model Pengembangan Kawasan Hortikultura)
- ATP (Alat Tabur Pupuk)
- PELSA (Pelapor Desa) Keswan
- Teknologi Tepat Guna
- Aplikasi Web Polman Satu Data
- MOGE (Mobile Masagena)
- MASIGA MPP AIM (Mudah, Transparansi, dan Gampang Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena)
- Smart School
- MEPAGURU (Membangun Kapasitas Guru Penggerak) Berbasis Aplikasi Android
- Aplikasi Pelaporan Berkala Pelaksanaan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
- IBAS (Inovasi Bank Sampah) Sipamandaq
- SIMPEDA (Sistem Percepatan Dokumen Akta Kelahiran dan Akta Kematian)
- AGEN KOBAK DUKCAPIL POLMAN (Aksi Gerakan Dokumen Kependudukan Bagi Korban Bencana Dinas Kependudukan Catatan Sipil Polewali Mandar)
- PELENDUK JAGO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Go Digital)

- GASPOL CINTA PM (Gerakan Aparatur Satpol PP Cinta Polewali Mandar)
- MATINGMA P6 GAKUM BAKAR (Pusat Pelayanan Pengaduan Perda, Perkada Gangguan Ketertiban dan Bencana Kebakaran)
- Teras POP (Teras Pemuda Olahraga & Pariwisata)
- WISATA KOTA SI JAGO (Kolaborasi antara Seni Jajanan & Olahraga Polman)
- KIS Pemuda (Kelas Inspiratif Pemuda)
- SIMONTOKDESI (Sistem Informasi Manajemen Operasional Terpadu Organisasi Pemuda dan Pemudi Potensi)
- Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Android
- D'BALATAU (Digitalisasi Kebencanaan dan Layanan Tanggapan Darurat)
- KLIK APIP (Klinik Layanan Konsultasi APIP)
- Smart Hospital
- METRO CUTY (Medical Tourism to Community Satisfaction)
- BERKAH (Bersama Kita Atasi Limbah)
- Taman Harmonis
- Berdaya dengan e-sakip (e-sakip v.3)

Untuk kategori penilaian IGA, penilaian indeks inovasi terdiri dari beberapa kategori/level, diantaranya :

- 1.Kategori sangat inovati : 60.00 – 100.00
- 2.Kategori inovatif : 30.00 – 59.99
- 3.Kategori kurang inovatif : 00.01 – 29.99
- 4.Kategori tidak dapat dinilai : 00.00

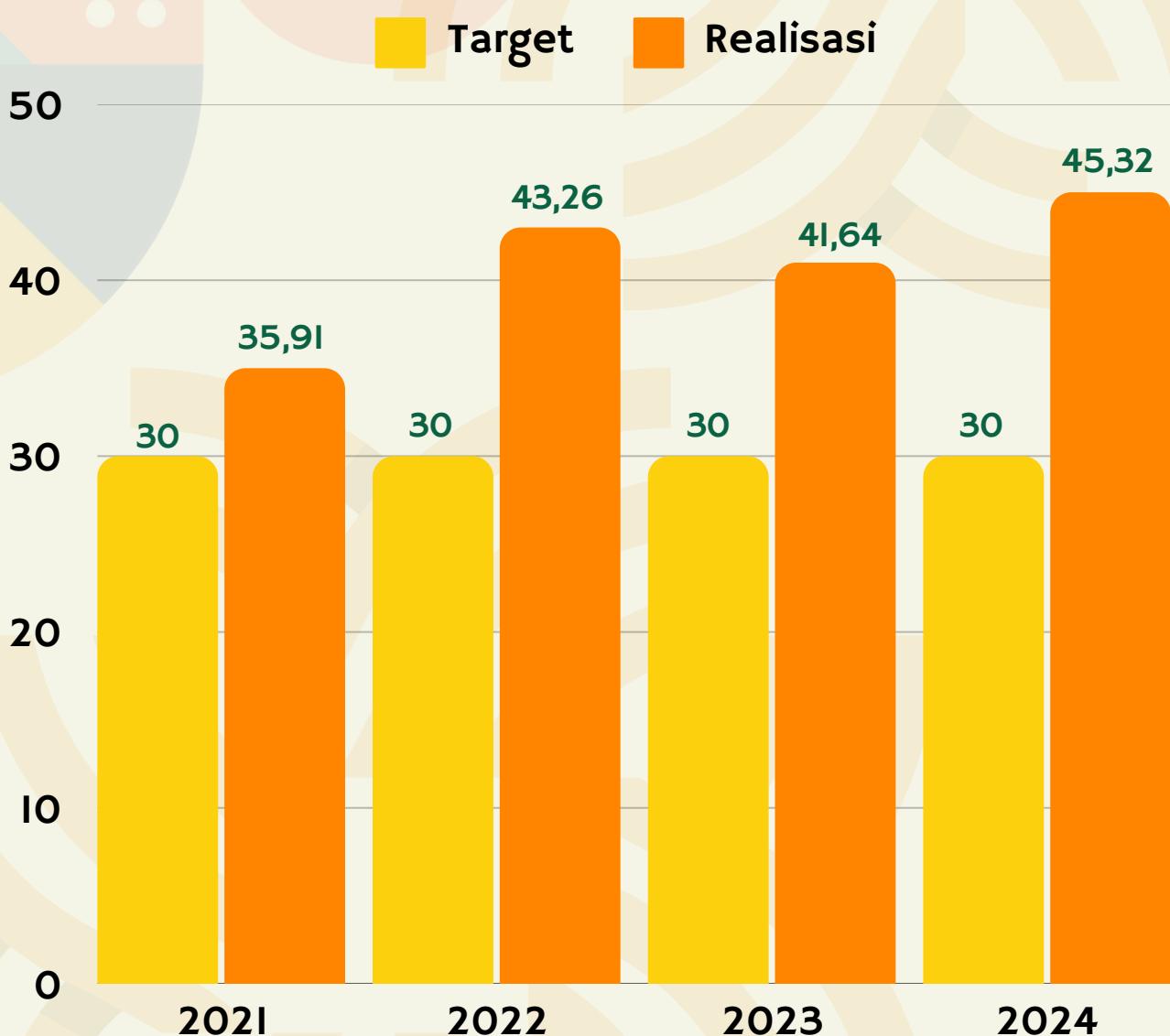


Hasil evaluasi sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah, mendapatkan angka tingkat capaian realisasi sebesar 151,06% dengan predikat Sangat Berhasil.

## B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian indkes inovasi daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan realisasi indeks inovasi daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 151,06% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi ini mengalami perbaikan indeks dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023.

Perbandingan capaian indeks inovasi daerah serta dibandingkan dengan target akhir tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 2)**

| Sasaran                              | Indikator Sasaran     | Target 2024      | Realisasi 2024   | Capaian 2024 | Target Akhir Renstra (%) 2024 | Capaian % 2024 terhadap target 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Indeks Inovasi daerah | Inovatif (30,00) | Inovatif (45,32) | 151,06       | Sangat Inovatif (60,00)       | 75,53                               |

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Tahun 2024 mencapai nilai sebesar 75,53% dengan kategori berhasil. Nilai capaian tersebut sudah hampir mendekati target akhir Tahun 2024 dengan nilai indeks 60,00 kategori sangat inovatif.

### **C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Untuk indikator indeks inovasi daerah perangkat daerah ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tersebut :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Faktor Pedukung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adanya dukungan dari seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengusulan hasil-hasil inovasi yang ada di perangkat daerahnya</li> <li>❖ Beberapa hasil proyek perubahan oleh Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklatpim menghasilkan karya inovasi yang dapat diikutkan dalam penghargaan IGA</li> </ul>   |
| <b>Faktor Penghambat</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan disebabkan oleh tidak adanya bidang khusus yang menangani fungsi penelitian dan kelitbang yang ada di Balitbangren</li> <li>❖ Masih minimnya pengembangan SDM penelitian dan pengembangan</li> <li>❖ Belum optimalnya pemahaman terkait indeks inovasi karena masih kurangnya sosialisasi terkait indeks inovasi daerah dan pelaksanaan IGA</li> </ul>   |
| <b>Solusi</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mewajibkan setiap Perangkat Daerah, kecamatan ataupun desa menghasilkan karya inovasi untuk diikutkan dalam Innovative Government Award (IGA)</li> <li>❖ Perlu adanya aplikasi e-Litbang untuk mengumpulkan semua data-data hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar</li> <li>❖ Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan sosialisasi terkait indeks inovasi daerah</li> </ul> |

## D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks inovasi pada tahun 2024 yaitu program Penelitian dan Pengembangan dengan 2 kegiatan, 3 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

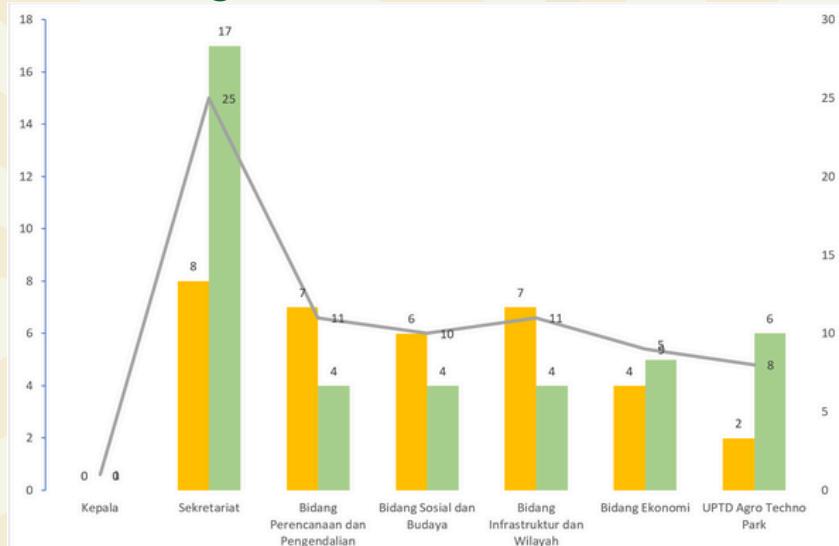
**Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2)**

| Program  | Indikator Kinerja  | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|--|--|-----------|-----------|-------------|
| <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                          | <i>Persentase Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>   | 100%      | 100%      | 100         |
| <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b> | <i>Persentase Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan Yang Dimanfaatkan</i> | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                     | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b> | <i>Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan</i>                   | 2 laporan | 2 laporan | 100         |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan               | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan              | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman              | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| <b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                         | <i>Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi danPembangunan</i>                    | 1 laporan | 1 laporan | 100         |
| Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah                                | 1 laporan | 1 laporan | 100         |

## E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah diperoleh dengan efisisensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada grafik dibawah :

**Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 2)**



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja Penelitian dan Pengembangan tersebar di beberapa Bidang diantaranya Bidang Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi serta UPTD Agro Techno Park. Bidang Sosial Budaya yang jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 6 (tujuh) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak. Bidang Ekonomi yang jumlahnya sebanyak 9 (sembilan) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 4 (empat) pegawai ditambah 5 (lima) tenaga kontrak. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang jumlahnya sebanyak 11 (sebelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai

ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak. UPTD Agro Techno Park yang jumlahnya 8 (delapan) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 2 (dua) pegawai ditambah 6 (enam) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja /perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator indeks inovasi daerah sebesar Rp. 1.069.999.675,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 896.123.987,- atau 83,74 %.

### A.3.3 Sasaran Strategis 3 (Tiga)

MENINGKATNYA  
KUALITAS TATA  
KELOLA  
PEMERINTAHAN  
PERANGKAT  
DAERAH

INDIKATOR  
1

Indeks kepuasan Pengguna  
Pelayanan publik perangkat  
daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalannya organisasi, baik pengelolaan secara internal maupun secara eksternal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan public pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses

pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholder untuk mewujudkannya. Keinginan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik/good governance adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, keterbukaan /transparansi, ketaatan pada aturan hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik diukur berdasarkan indikator :

## I. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kewenangan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah bertanggungjawab

baik kepada masyarakat yang berkepentingan.

## 3. Penegak Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supre masi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsif, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, indepedensi pera dilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia

## A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks inovasi pada tahun 2024 yaitu program Penelitian dan Pengembangan dengan 2 kegiatan, 3 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

1. Layanan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
2. Layanan Data Informasi Sektor Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3. Layanan data informasi sektor Bidang Sosial Budaya
4. Layanan data informasi sektor Bidang Ekonomi
5. Layanan Informasi Geospasial

6.Layanan Sarana dan Prasarana Pertanian

7.Layanan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sistem Informasi Geografis (SIG)

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu indeks kepuasan masyarakat/pengguna layanan (IKM). Metode pengukuran IKM berpedoman pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah yaitu Balitbangren Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut berikut ini :

**Tabel Hasil Survei Kepuasan Layanan berdasarkan jenis layanan diinci per unsur layanan**

| No. | Jenis Layanan   | Unsur Pelayanan  |          |                 |                             |                        |                    | Nilai IKM               |
|-----|---|------------------|----------|-----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|     |   | Persyaratan      | Prosedur | Waktu Pelayanan | Biaya/ Tarif produk Layanan | Kompetenansi Pelaksana | Perilaku Pelaksana |                         |
| 1.  | Penelitian dan Pengembangan Aspek-aspek sosial  | 3.074            | 3.370    | 3.296           | 3.778                       | 3.222                  | 3.296              | 3.556 3.444 3.778 85.5  |
| 2.  | Layanan Data Informasi Sektor Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah             | 3.273            | 3.364    | 3.273           | 3.636                       | 3.273                  | 3.182              | 3.364 3.455 3.636 84.5  |
| 3.  | Layanan data informasi sektor Bidang Sosial Budaya                                      | 3.375            | 3.313    | 3.296           | 3.625                       | 3.188                  | 3.188              | 3.313 3.250 3.688 83.8  |
| 4.  | Layanan data informasi sektor Bidang Ekonomi  | 3.429            | 3.429    | 3.286           | 3.786                       | 3.500                  | 3.571              | 3.643 3.500 3.571 88.03 |
| 5.  | Layanan Informasi Geospasial  | 3.167            | 3.667    | 3.333           | 3.833                       | 3.333                  | 3.500              | 3.833 3.500 3.500 87.9  |
| 6.  | Layanan Pendampingan penekaran benih padi dan palawijavarietas BATAN                    | 3.261            | 3.348    | 3.217           | 3.043                       | 3.304                  | 3.261              | 3.348 3.304 3.870 83.18 |
| 7.  | Layanan Sarana dan Prasarana Pertanian  | 3.500            | 3.500    | 3.500           | 4.000                       | 3.500                  | 3.500              | 3.500 3.500 3.500 88.9  |
| 8.  | Layanan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Geografis (SIG) | 3.750            | 3.750    | 3.500           | 3.500                       | 3.500                  | 3.750              | 3.750 3.250 3.250 88.83 |
|     |   | 3.354            | 3.468    | 3.318           | 3.332                       | 3.353                  | 3.406              | 3.538 3.400 3.599 87.9  |
|     |   | Jumlah Rata-rata |          |                 |                             |                        |                    | 87.9                    |

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah (Balitbangren) berada pada nilai 87,9 atau kategori B (baik) sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

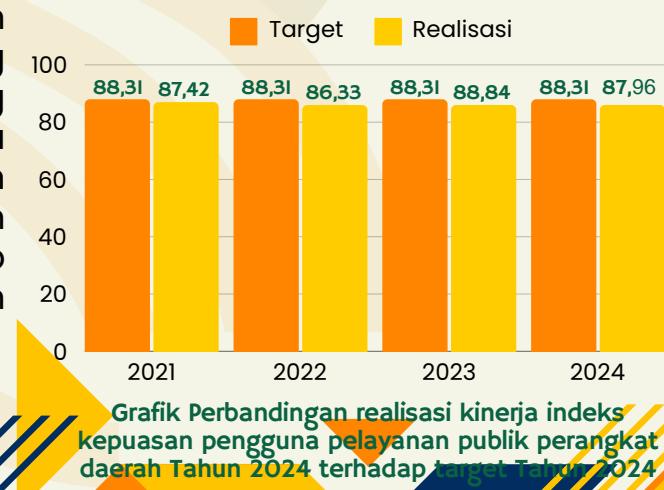
| Kinerja Unit Pelayanan | Mutu Layanan | Nilai Konversi     | Nilai Interval SKM  | Nilai Persepsi |
|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Tidak Baik             | D            | 25-64,99           | 1,00-2,5996         | 1              |
| Kurang Baik            | C            | 65,00-76,60        | 2,60-3,064          | 2              |
| <b>Baik</b>            | <b>B</b>     | <b>76,61-88,30</b> | <b>3.0644-3.532</b> | <b>3</b>       |
| Sangat Baik            | A            | 88,31-100          | 3,5324-4,00         | 4              |



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan atas 8 jenis layanan Balitbangren Tahun 2024 mencapai indeks 87.96 atau predikat kinerja layanan Baik. Capain ini belum mencapai target predikat Sangat Baik dengan nilai 88.31 dimana hasil penilaian IKM hanya sebesar 87.96 namun dari segi capaian tergolong kategori Sangat Berhasil dengan nilai 99,53%.

## B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks inovasi pada tahun 2024 yaitu program Penelitian dan Pengembangan dengan 2 kegiatan, 3 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 99,53% dengan kategori sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2023 kondisi ini menurun dibandingkan capaian tahun 2024.

Perbandingan capaian kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikutini :

**Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 3)**

| Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 | Target Akhir Renstra (%) 2024 | Capaian % 2024 terhadap target 2024 |
|---|--|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | 88.31       | 87.96          | 99.53%       | 88.31                         | 99.53                               |

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai nilai sebesar 99,53% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut mendekati target akhir Renstra.

## C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tersebut :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Faktor Pendukung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adanya aplikasi Survei Pelayanan Publik pada website.polmankan.go.id</li> <li>❖ Tingginya motivasi kerja pegawai</li> </ul>  |
| <b>Faktor Penghambat</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya informasi kepada pengguna layanan aplikasi Survei Pelayanan Publik dalam pengisian kuesioner online</li> <li>❖ Belum memadaiannya sarana dan prasarana pelayanan</li> </ul>   |
| <b>Solusi</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Diperlukannya monitoring untuk setiap proses yang dilakukan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang perlu dilakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> <li>❖ Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana kerja</li> <li>❖ Melakukan sosialisasi baik secara lisan melalui petugas pelayanan maupun sosialisasi secara online (medsos dsb) terkait survei pelayanan publik secara online melalui aplikasi</li> </ul> |

## D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah pada tahun 2024 yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan 7 kegiatan, 24 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

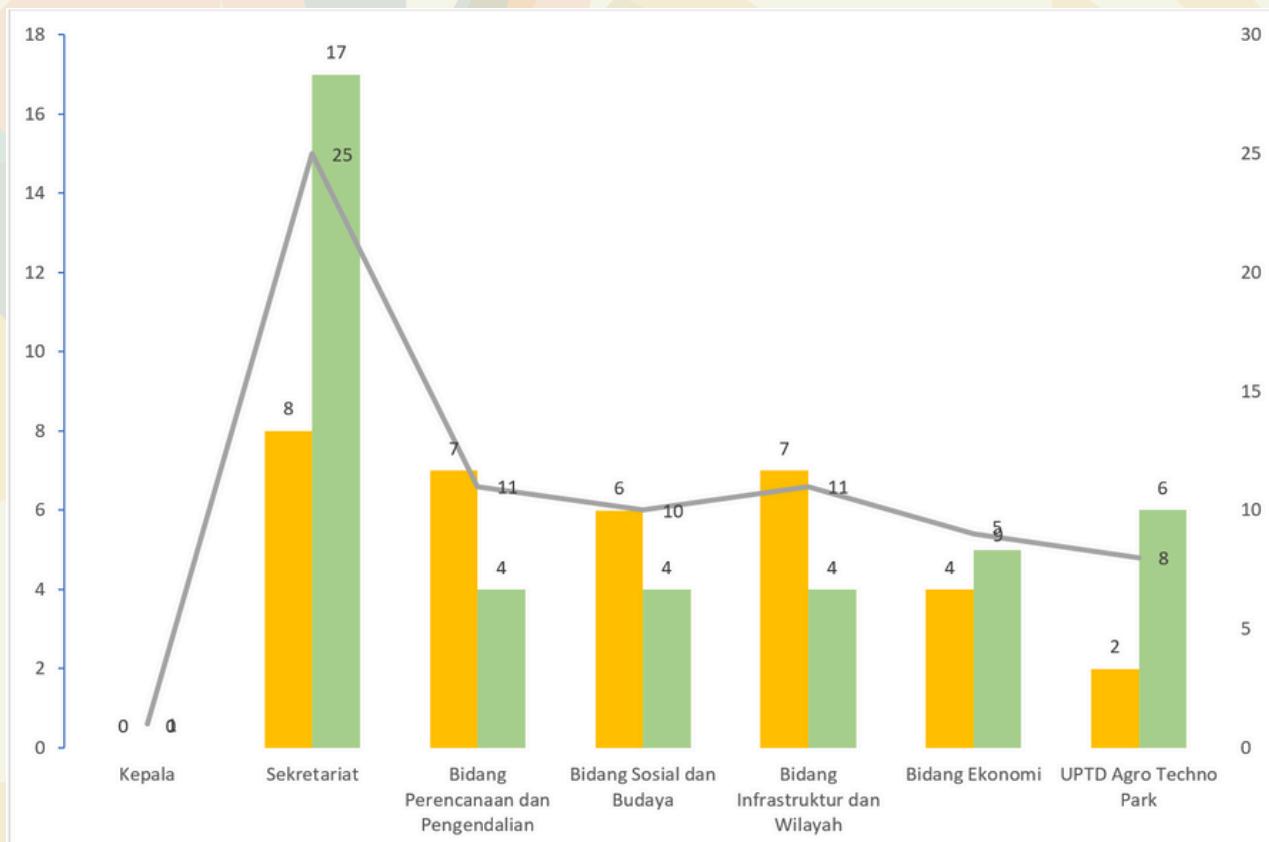
**Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 3)**

| Program   | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  | Percentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar tepat waktu              | 100%        | 100%        | 100         |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Percentase Tertib Administasi UmumKantor  | 100%        | 100%        | 100         |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan                    | 3 Jenis     | 3 Jenis     | 100         |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan  | 8 Jenis     | 8 Jenis     | 100         |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan   | 3 Jenis     | 3 Jenis     | 100         |
| Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 24 Jenis    | 24 Jenis    | 100         |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 378 Laporan | 378 Laporan | 100         |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah laporan pengelolaan Informasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 100         |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>Percentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuaistandar dan prosedur</i>           | 100%        | 100%        | 100         |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola                   | 1.060 surat | 1.060 surat | 100         |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                | 2 Jenis     | 2 Jenis     | 100         |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                  | 2.625 M     | 2.625 M     | 100         |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | <i>Percentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik</i>  | 100%        | 100%        | 100         |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit      | 2 Unit      | 100         |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit      | 7 Unit      | 100         |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara   | 3 Jenis     | 3 Jenis     | 100         |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi                             | 1 Gedung    | 1 Gedung    | 100         |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | <i>Percentase ketersediaan KebutuhanBMD sesuai RKBMD</i>  | 100%        | 100%        | 100         |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan  | 2 Jenis     | 2 Jenis     | 100         |

## E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

**Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (indikator 3)**



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja bagian umum dan kepegawaian sekretariat Balitbangren yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 8 (sepuluh) pegawai ditambah 17 (tujuh belas) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah sebesar Rp. 961.227.953,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 905.036.661,- atau 94.15%

MENINGKATNYA  
KINERJA  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

INDIKATOR  
2

## Predikat SAKIP perangkat daerah

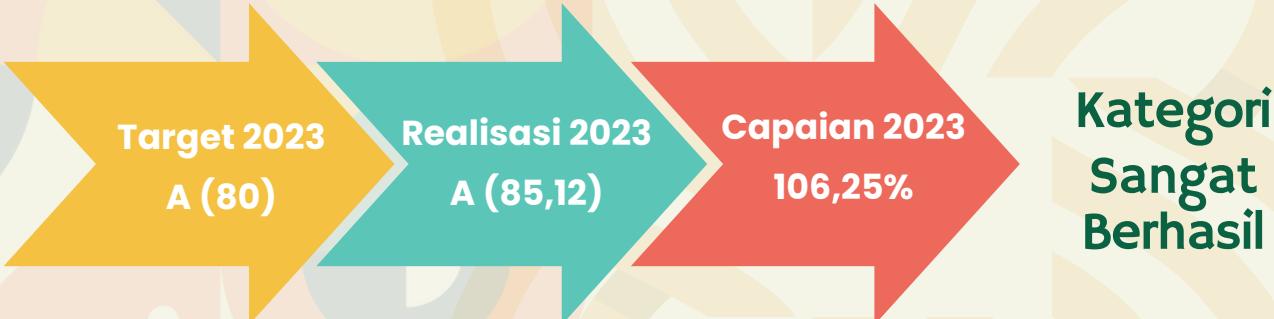
### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana Instansi ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, semakin tinggi nilai SAKIP dapat menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan. Berdasarkan surat dari Inspektorat Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor 047.7/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 tingkat Akuntabilitas kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapatkan nilai 85.12 dengan predikat A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Komponen yang menjadi penilaian. Rincian hasil penilaian SAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan terdiridari :

- Perencanaan Kinerja : 29.75
- Pengukuran Kinerja : 22.81
- Pelaporan Kinerja : 12.09
- Evaluasi Internal : 6.48
- Capaian Kinerja: 14,00

Perencanaan kinerja dilakukan secara berjenjang dimulai dari penentuan sasaran perangkat daerah yang dapat menunjang terwujudnya visi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 kemudian dijabarkan pada perencanaan kinerja eselon III dan eselon IV sebagai penanggung jawab tercapainya output dari kegiatan. Demikan halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang dimulaidari eselon IV sampai eselon II. Tercapainya output yang telah direncanakan mendukung pencapaian sasaran dan tujuna perangkat daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah, mendapatkan angka rata-ratacapaian kinerja sebesar 106.25% dengan predikat sangat berhasil.



Dari data tersebut diatas diketahui pencapaian target indikator predikat SAKIP perangkat daerah capaiannya adalah 106,25%. Dari target yang ditetapkan adalah A realisasinya juga A dengan nilai 85,12. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pertanggung jawaban penggunaan anggaran pada Balitbangren telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel walaupun belum optimal.

## B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian Predikat SAKIP perangkat daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik Perbandingan realisasi kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah Tahun 2024 terhadap targetTahun 2024**



Dari grafik diatas, terlihat bahwa perkembangan hasil penilaian terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Balitbangren yang telah dilakukan oleh Inspektorat selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2023. Nilai akuntabilitas kinerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian kinerja mencapai 106,25% dengan kategori sangat berhasil.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai nilai sebesar 106,25% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut sudah mencapai target dan tetap harus dipertahankan predikat tersebut.

**Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 4)**

| Sasaran   | Indikator Sasaran               | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 | Target Akhir Renstra (%) 2024 | Capaian % 2024 terhadap target 2024 |
|---|---------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Predikat SAKIP perangkat daerah | A (80)      | A (85,12)      | 106,25       | A (80)                        | 106,25                              |

Perbandingan capaian kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator predikat SAKIP perangkat daerah ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tersebut :

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Faktor Pedukung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Komitmen Balitbangren dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</li> <li>❖ Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke seluruh terendah</li> <li>❖ Komitemen seluruh personil (ASN) untuk meningkatkan kinerja</li> </ul>  |
| <b>Faktor Penghambat</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya pemahaman beberapa ASN terkait indikator sasaran kinerjanya</li> <li>❖ Belum optimalnya pemahaman pengelolaan data kinerja</li> <li>❖ Adanya regulasi terkait nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan</li> </ul>  |
| <b>Solusi</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memaksimalkan aplikasi Simkinerja yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan</li> <li>❖ Memberikan pengutang kepada ASN khususnya pejabat eselon yang menandatangani perjanjian kinerja</li> <li>❖ Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi ke setiap bidang terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada tujuan dan sasaran perangkat daerah</li> </ul> |

## D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Predikat SAKIP perangkat daerah pada tahun 2024 yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 3 sub kegiatan Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

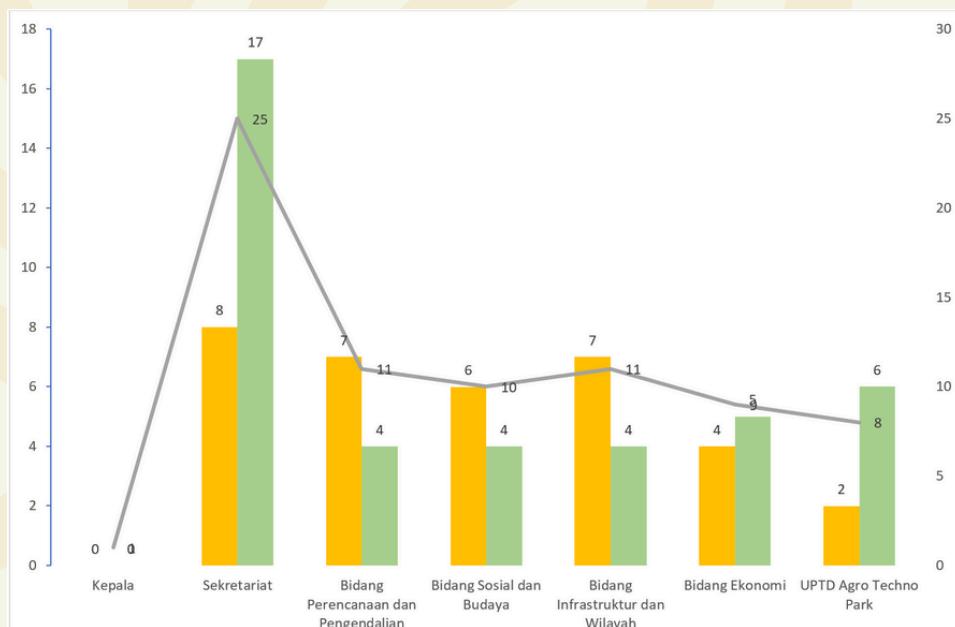
**Tabel Program, kegiatan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 4)**

| Program   | Indikator Kinerja  | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Percentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100%      | 100%      | 100         |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Percentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepatwaktu                          | 100%      | 100%      | 100         |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Laporan | 2 Laporan | 100         |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | 2 Laporan | 2 Laporan | 100         |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan | 4 Laporan | 100         |

## E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah diperoleh dengan efisisensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah:

**Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 4)**



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja sekretariat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 8 (delapan) pegawai ditambah 17 (tujuh belas) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator Predikat SAKIP perangkat daerah sebesar Rp. 9.430.830,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.853.000,- atau 93,87%

MENINGKATNYA  
KUALITAS TATA  
KELOLA  
PEMERINTAH  
PERANGKAT  
DAERAH

INDIKATOR  
3

Percentase tertib pengelolaan  
keuangan dan asset daerah  
perangkat daerah

## A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pengelolaan keuangan perangkat daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi selama periode satu tahun. Tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah menggambarkan sejauh mana proses tahapan pengelolaan keuangan dan asset dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan didukung oleh bukti-bukti administrasi yang dapat diperlengkungjawabkan. Berdasarkan IKU 2019-2024, indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan asset dibagi dengan jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan asset

### 1. Tahap perencanaan

Tahapan pertama adalah mengelola keuangan dan asset perangkat daerah yaitu melakukan perencanaan terhadap penggunaan anggaran, dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam perencanaan anggaran dan asset juga membutuhkan persetujuan dari pihak legislatif daerah melalui proses asistensi.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh rencana yang telah disepakati akan terlaksana dengan baik yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun

### 3.Tahap Pengawasan

Dalam melaksanakan keuangan dan asset perangkat daerah, tentu saja yang dibutuhkan pengawasan dari berbagai macam pihak. Mulai dari pihak inspektorat selaku perangkat daerah yang melakukan pengawas, pejabat yang berwenang, hingga bahkan masyarakat umum juga berhak melakukan pengawasan pengelolaan keuangan. Pengawasan ini terkait sejauh mana pelaksanaan anggaran dan asset yang telah direncanakan dan dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan apakah sesuai target atau tidak.

Dari keseluruhan tahapan tersebut seluruhnya apakah proses dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau tidak. Sehingga persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah dapat dihitung sebagai berikut :

### 4.Tahap pertanggungjawaban

Terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban dimana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bahwa perangkat daerah dalam mengelola dan melaksanakan keuangan dan asset harus dapat memberikan pertanggung jawaban. Sehingga dapat memberikan informasi yang jelas apakah penggunaan anggaran dan aset sudah tepat dan sesuai sasaran atau tidak. Pada tahapan pertanggung jawaban ini berupa laporan keuangan akhir tahun yang memuat seluruh pelak sanaan keuangan dan pengelolaan aset selama satu tahun.

**Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah =**

$$\frac{\text{Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan asset yang tertib}}{\text{Jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan asset}} \times 100$$

$$= \frac{4}{4} \times 100 \\ = 100\%$$

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.



## B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik Perbandingan realisasi kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024**



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya tetap konsisten.

Perbandingan capaian kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikutini :

**Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 5)**

| Sasaran   | Indikator Sasaran                               | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 | Target Akhir Renstra (%) 2024 | Capaian % 2024 terhadap target 2024 |
|---|---|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah | Percentase pengelolaan keuangan dan aset daerah | 100%        | 100%           | 100%         | 100%                          | 100%                                |

## **C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Untuk indikator tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tersebut :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Faktor Pendukung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Komitmen Balitbangren dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</li> <li>❖ Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke seluruh terendah</li> <li>❖ Komitemen seluruh personil (ASN) untuk meningkatkan kinerja</li> </ul> |
| <b>Faktor Penghambat</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih kurangnya SDM pejabat pengelola keuangan dalam hal pelaporan sehingga pejabat pengelola keuangan lainnya harus rangkap pekerjaan</li> <li>❖ Masih kurangnya sosialisasi kepada keuangan apabila ada kebijakan dan aplikasi terbaru</li> </ul>  |
| <b>Solusi</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membrikan sosialisasi dan pembelajaran kepada seluruh pengelola SPJ di bidang-bidang terkait pengelolaan SPJ sehingga dapat meminimalisir temuan administrasi keuangan dari inspektorat</li> <li>❖ Melakukan perbaikan-perbaikan dari hal administrasi baik keuangan maupun pengelolaan aset</li> </ul>  |

## **D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG**

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatanyang dilakasanakan untuk mendukung indikator Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada tahun 2024 yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 2 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

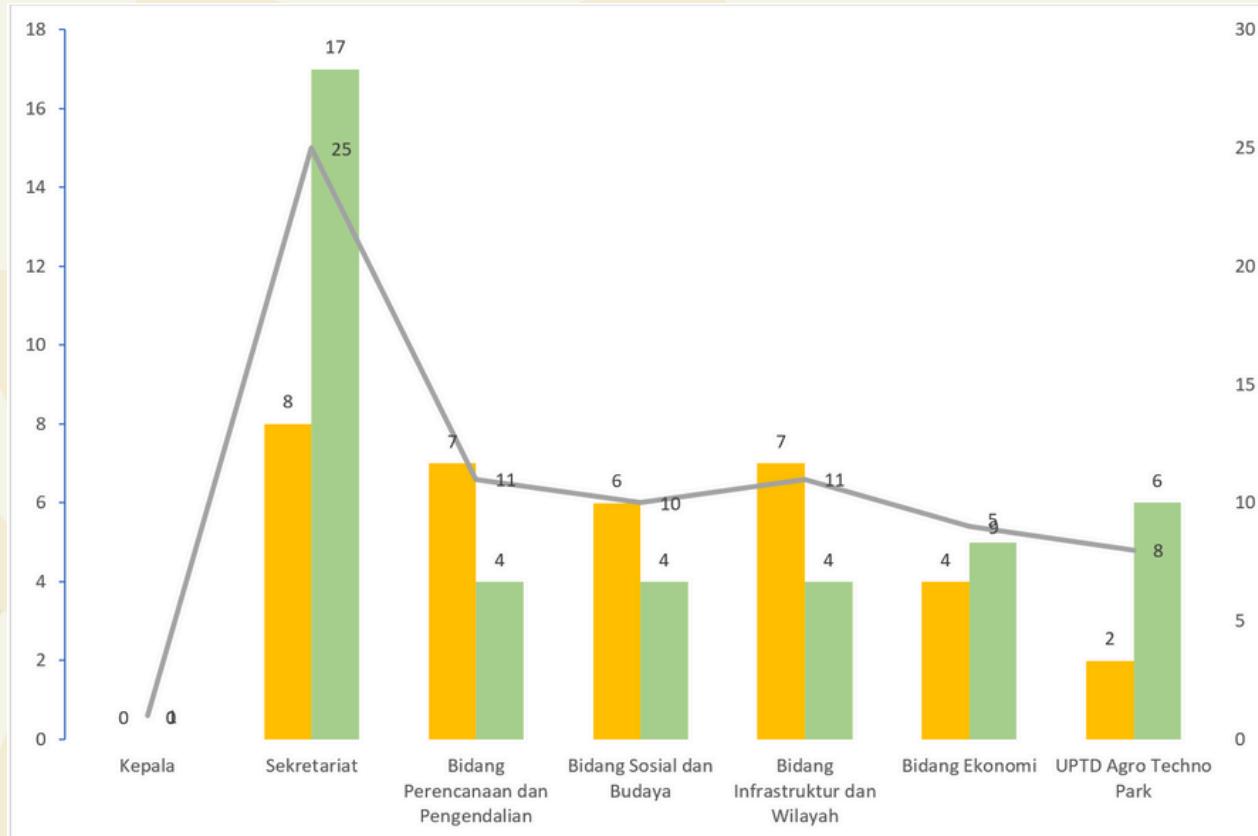
**Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 5)**

| Program   | Indikator Kinerja  | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|-----------|-----------|-------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Percentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar tepat waktu                           | 100%      | 100%      | 100         |
| Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah                          | Percentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu  | 100%      | 100%      | 100         |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah orang yang menerima gajidan tunjangan ASN   | 36 Orang  | 36 Orang  | 100         |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100         |

## E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah diperoleh dengan efisisensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

**Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 5)**



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja sekretariat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 8 (delapan) pegawai ditambah 17 (tujuh belas) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator Predikat SAKIP perangkat daerah sebesar Rp. 2.541.219.433,20,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.485.373.246 atau 97,8%

# B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Balitbangren untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis, memerlukan dukungan anggaran. Pada tahun 2024, Balitbangren mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.472.427.548,07 yang direalisasikan sebesar Rp. 5.051.586.906,- atau sebesar 92,31% Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
2. Sisa murni beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan
3. Penurunan volume belanja yang disebabkan oleh faktor teknis saat pelaksanaan kegiatan

Jika dibandingkan dengan hasil kinerja yang sudah dicapai dengan pengguna anggaran, maka sudah terjadi efektifitas penggunaan anggaran. Dimana sasaran startegis Balitbangren untuk 18 (delapan belas) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 92,31 % dan diimbangi dengan capaian realisasi anggaran sesuai dengan tabel berikut ini:

**Tabel Efisiensi Akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun 2024**

| Sasaran Strategis dan Indikator   | Target              | Realisasi        | %      | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | %     | %Efisiensi | Keterangan   |
|---|---------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|--|
| <b>Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>                                      |                     |                  |        |                       |                         |       |            | Program Pengendalian dan Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar an tepat waktu | 100 %               | 100%             | 100%   | 890.549.655           | 756.200.012             | 84,91 | -15,09     |  |
| <b>Meningkatnya kualitas noviasi daerah</b>   |                     |                  |        |                       |                         |       |            | Program Penelitian dan Pengembangan  |
| Indeks Inovasi Daerah   | Inovatif (30,00)    | Inovatif (45,32) | 151,06 | 1.069.999.921         | 896.123.987             | 83,74 | -16,26     |  |
| <b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah</b>                          |                     |                  |        |                       |                         |       |            |  |
| Indeks kepuasan pengguna layanan publik perangkat daerah  | Sangat Baik (88,31) | Baik (87,96)     | 99,53% | 961.227.953           | 905.036.661             | 94,15 | -5,85      |  |
| Predikat SAKIP Perangkat Daerah   | A (80)              | A (85,12)        | 106,25 | 9.430.830             | 8.853.000               | 93,88 | 6,12       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten   |
| Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah                                | 100                 | 100              | 100    | 3.549.539.060         | 2.485.373.246           | 70,01 | 29,98      |  |

Dari tabel diatas menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,69% berdasarkan rata-rata realisasi kinerja Balitbangren Tahun 2024 penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 92,31% telah mampu menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 96%. Penjelasan mengenai realisasi anggaran tahun 2024 dapat tersajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel Realisasi Anggaran Tahun2024**

| Program   | Alokasi (RP)     | Realisasi (RP) | Persentase (%) |
|---|------------------|----------------|----------------|
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | 9.430.830        | 8.853.000      | 93,87          |
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5.623.530        | 5.423.000      | 96,43          |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD   | 2.978.130        | 2.683.000      | 90,09          |
| 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 829.170          | 747.000        | 90,09          |
| <b>Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah</b>   | 2.541.219.433,20 | 2.485.373.246  | 97,80          |
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 2.537.643.643,20 | 2.481.884.246  | 97,80          |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 3.575.790        | 3.489.000      | 97,57          |
| <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>                              | 335.797.221,10   | 306.695.555    | 91,33          |
| <b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | 290.516.700      | 277.030.065    | 95,36          |
| 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                        | 11.586.060       | 10.250.740     | 88,47          |
| 2. Pelaksanaan Konsultasi Publik  | 5.550.060        | 5.528.220      | 99,61          |
| 3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                              | 7.629.120        | 7.542.000      | 98,86          |
| 4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | 48.466.310       | 48.321.000     | 98,70          |
| 5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan  | 8.951.460        | 3.381.000      | 37,77          |
| 6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota          | 208.333.690      | 202.007.105    | 96,96          |
| <b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | 3.893.280        | 3.782.400      | 97,15          |
| 1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah              | 3.893.280        | 3.782.400      | 97,15          |
| <b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            | 35.004.201,10    | 22.409.090     | 64,02          |
| 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota           | 3.621.330        | 3.059.090      | 84,47          |
| 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 | 31.382.870       | 19.350.000     | 61,66          |
| <b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>        | 6.383.040        | 3.474.000      | 54,43          |
| 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah           | 6.383.040        | 3.474.000      | 54,33          |

| Program   | Alokasi (RP)   | Realisasi (RP) | Percentase (%) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | 9.430.830      | 8.853.000      | 93,87          |
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5.623.530      | 5.423.000      | 96,43          |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD   | 2.978.130      | 2.683.000      | 90,09          |
| 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 829.170        | 747.000        | 90,09          |
| <b>Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah</b>   | 3.549.539.060  | 2.485.373.246  | 97,80          |
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 3.545.963.270  | 2.481.884.246  | 97,80          |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 3.575.790      | 3.489.000      | 97,57          |
| <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>                              | 335.797.221,10 | 306.695.555    | 91,33          |
| <b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | 290.516.700    | 277.030.065    | 95,36          |
| 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                        | 11.586.060     | 10.250.740     | 88,47          |
| 2. Pelaksanaan Konsultasi Publik  | 5.550.060      | 5.528.220      | 99,61          |
| 3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                              | 7.629.120      | 7.542.000      | 98,86          |
| 4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | 48.466.310     | 48.321.000     | 98,70          |
| 5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan  | 8.951.460      | 3.381.000      | 37,77          |
| 6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota          | 208.333.690    | 202.007.105    | 96,96          |
| <b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | 3.893.280      | 3.782.400      | 97,15          |
| 1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah              | 3.893.280      | 3.782.400      | 97,15          |
| <b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            | 35.004.201,10  | 22.409.090     | 64,02          |
| 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota           | 3.621.330      | 3.059.090      | 84,47          |
| 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 | 31.382.870     | 19.350.000     | 61,66          |
| <b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>        | 6.383.040      | 3.474.000      | 54,43          |
| 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah           | 6.383.040      | 3.474.000      | 54,33          |

| Program   | Alokasi (RP) | Realisasi (RP) | Persentase (%) |
|---|--------------|----------------|----------------|
| <b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   | 554.752.434  | 449.504.457    | 81,03          |
| <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>  | 389.736.841  | 300.803.490    | 77,18          |
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RKPD                     | 28.149.371   | 25.843.200     | 91,81          |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 675.000      | 0              | 0              |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 300.791.638  | 225.892.514    | 75,10          |
| 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD              | 52.395.692   | 46.659.776     | 89,05          |
| 5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 2.474.880    | 2.408.000      | 97,30          |
| 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 5.250.260    | 0              | 0              |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)</b>  | 74.253.444   | 68.230.392     | 91,89          |
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD                     | 29.591.042   | 29.315.292     | 99,07          |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 803.640      | 724.000        | 90,09          |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 2.545.720    | 852.000        | 33,47          |
| 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD                              | 33.819.462   | 31.896.100     | 94,31          |
| 5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA   | 2.783.460    | 2.011.000      | 72,25          |
| 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | 4.710.120    | 3.432.000      | 72,66          |

| Program   | Alokasi (RP)            | Realisasi (RP)       | Persentase (%) |
|---|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah</b>   | 90.762.149              | 80.470.575           | 88,66          |
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD, RPJMD dan RKPD              | 9.695.326               | 45.728.261           | 92,02          |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 2.350.156               | 2.101.600            | 89,42          |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3.383.502               | 3.263.200            | 96,44          |
| 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah RPJPD, RPJMD dan RKPD                  | 28.092.293              | 22.942.514           | 81,67          |
| 5. +Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah                              | 2.666.022               | 2.030.000            | 76,14          |
| 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah     | 4.574.850               | 4.405.000            | 96,29          |
| <b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>  | 1.069.999.675,97        | 896.123.987          | 83,75          |
| <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>  | 260.148.490             | 197.655.616          | 100            |
| 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial   | 260.148.490             | 197.655.616          | 100            |
| <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>  | 257.044.520             | 244.215.815          | 99,99          |
| 1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | 147.434.240             | 135.078.350          | 100            |
| 2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman   | 109.610.280             | 109.137.465          | 100            |
| <b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | 552.806.911             | 454.252.556          | 100            |
| 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi   | 552.806.911             | 454.252.556          | 100            |
| <b>Jumlah</b>   | <b>5.472.427.548,07</b> | <b>5.051.586.906</b> | <b>92,31</b>   |



# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
**Tahun 2024**



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar  
Badan Penelitian Pengembangan  
dan Perencanaan

## BAB IV PENUTUP

# BAB IV

# PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2024, Capaian kinerja Balitbangren Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Balitbangren sebesar 96 % serta capaian kinerja keuangan sebesar 92,31%, sehingga memperlihatkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,69%.

Mengingat masih adanya kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penyusunan LAKIP ini, maka langkah-langkah penting yang harus dilakukan ke depan untuk meningkatkan kinerja Balitbangren diantaranya :

1. Meningkatkan pelayanan publik secara maksimal dengan memperhatikan saran dan masukan dari pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan Balitbangren serta meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan.
2. Agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas data evaluasi dan pada akhirnya dapat menghasilkan laporan akuntabilitas yang baik dan berkualitas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Badan Penelitian,  
Pengembangan dan Perencanaan,**  
  
**Andi Himawan Jasin, ST. M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 197502152005021002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

# LAMPIRAN

## Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

| TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | FORMULA   |
|--|---|--|---|
| Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Akuntabel dan Modern |   | Indeks Reformasi Birokrasi   | Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi   |
|  | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu/jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan X 100  |
|  | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                | Indeks Inovasi Daerah  | Hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah divalidasi oleh Badan Litbang kemendagri melalui proses penjaminan mutu oleh unit UKKPPM  |
|  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah                                       | Jumlah indeks kepuasan stakeholder atas survei kepuasan pelayanan publik yang dilakukan perangkat daerah secara berkala dibagi dengan jumlah jenis pelayanan perangkat daerah yang dilakukan survei |
|  |   | Predikat SAKIP Perangkat Daerah  | Hasil Review Inspektorat atau Implementasi SAKIP pada perangkat daerah  |
|  |   | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah                                 | Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dibagi dengan jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan aset   |

# LAMPIRAN

## Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan



### PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.co.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.co.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andi Himawan Jasin, ST., M.Si.**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Ilham Borahima**

Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Pj. Bupati Polewali Mandar,

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Penelitian Pengembangan  
dan Perencanaan,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19750215 200502 1 002

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2024**

| NO | SASARAN KINERJA   | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN 2023     | TARGET 2024 |
|----|---|--|------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah             | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu | 100%             | 100%        |
| 2  | Meningkatnya kualitas inovasi daerah                            | Indeks inovasi daerah  | Inovatif (41,64) | Inovatif    |
| 3  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Predikat SAKIP perangkat daerah  | A                | A           |
|    |   | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah                                 | 100%             | 100%        |
|    |   | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah                                       | Baik             | Sangat Baik |

| NO            | PROGRAM  | ANGGARAN                | KETERANGAN  |
|---------------|--|-------------------------|-------------|
| 1             | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Rp 4.530.197.843        | APBD        |
| 2             | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 329.633.648          | APBD        |
| 3             | Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | Rp 1.069.999.921        | APBD        |
| 4             | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Rp 340.926.290          | APBD        |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>Rp 6.270.757.702</b> | <b>APBD</b> |

Pihak Kedua,  
Pj.Bupati Polewali Mandar,

Drs. Muhammad Ilham Borahima

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan  
dan Perencanaan,

Andi Himawan Jasin, ST.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19750215 200502 1 002

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **A. IDRUS, SH**

Jabatan : Sekertaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**A. IDRUS, SH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19700605 200501 1 026

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

| NO | SASARAN KINERJA   | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 |
|----|---|--|--------------|-------------|
| 1  | 2   | 3  | 4            | 5           |
| 1  | <b>Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran</b>  | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100%         | 100%        |
|    |   | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu                       | 100%         | 100%        |
|    |   | Persentase tertib ketatausahaan kantor   | 76%          | 85%         |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu                         | 76%          | 100%        |
| 2  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah   | Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu                                    | 76%          | 100%        |
| 3  | Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja baik  | 100%         | 100%        |
| 4  | Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Tertib Administrasi Umum kantor   | 100%         | 100%        |
| 5  | Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD   | 100%         | 100%        |
| 6  | Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor   | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur        | 100%         | 100%        |
| 7  | Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik  | 93,76%       | 100%        |

| NO            | PROGRAM/KEGIATAN   | ANGGARAN                | KETERANGAN  |
|---------------|--|-------------------------|-------------|
| I             | <i>Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>              |                         |             |
| 1             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Rp 10.000.000           | APBD        |
| 2             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Rp 3.549.539.060        | APBD        |
| 3             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Rp 311.086.883          | APBD        |
| 4             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                | Rp 125.241.000          | APBD        |
| 5             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 9.872.340            | APBD        |
| 6             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Rp 515.027.730          | APBD        |
| 7             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat        | Rp 9.430.830            | APBD        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>Rp 4.530.197.843</b> | <b>APBD</b> |

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**A. IDRUS, SH**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19700605 200501 1 026

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SITTI HADIJAH, SE**  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. IDRUS, SH**  
Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**A. IDRUS, SH**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19700605 200501 1 026

Pihak Pertama,  
ANALIS KEUANGAN DAERAH,

**SITTI HADIJAH, SE.**  
Pangkat : Penata  
NIP : 19800504 201409 2 002

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NO  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 |
|-----|--|--|--------------|-------------|
| 1   | 2  | 3  | 4            | 5           |
| I   | <i>Meningkatnya tertib administrasi umum Perangkat Daerah</i>                          | <i>Percentase Tertib Administrasi Umum Kantor</i>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b> |
| 1   | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan                           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket      | 5 Paket     |
| 2   | Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | 3 jenis      | 3 Paket     |
| 3   | Terpenuhinya Kebutuhan Bahan/Material  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 19 Paket     | 23 Paket    |
| 4   | Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 233 laporan  | 216 laporan |
| II  | <i>Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor</i>             | <i>Percentase ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur</i>          | <b>100%</b>  | <b>100%</b> |
| 5   | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 jenis      | 1 Laporan   |
| 6   | Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2.625 M      | 1 Laporan   |
| III | <i>Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Percentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBD</i>  | <b>85%</b>   | <b>100%</b> |
| 8   | Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas jabatan  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 unit       | 2 unit      |
| 9   | Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas operasional/lapangan                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 unit       | 8 Unit      |
| 10  | Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor lainnya                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 3 Jenis      | 27 Unit     |
| 11  | Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2625 M       | 1 unit      |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | ANGGARAN       | KETERANGAN |
|----|--|----------------|------------|
| I  | <i>Administrasi umum Perangkat Daerah</i>                        |                |            |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 5.036.625   | APBD       |
| 2  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Rp 7.957.657   | APBD       |
| 3  | Penyediaan bahan/material  | Rp 12.307.569  | APBD       |
| 4  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Rp 249.233.200 | APBD       |
| II | <i>Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>      |                |            |
| 5  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | Rp 4.500.000   | APBD       |
| 6  | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                            | Rp 510.011.580 | APBD       |

# LAMPIRAN

| NO     | KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | ANGGARAN       | KETERANGAN |
|--------|---|----------------|------------|
| III    | <i>Pemeliharaan barang milik daerah<br/>penurjang urusan Pemerintah Daerah</i>                                      |                |            |
| 7      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 94.394.000  | APBD       |
| 8      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Rp 797.000     | APBD       |
| 9      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp 8.690.000   | APBD       |
| 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Rp 21.360.000  | APBD       |
| JUMLAH |   | Rp 914.287.631 | APBD       |

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**A. IDRUS, SH**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19750215 200502

Pihak Pertama,  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN,

**SITTI HADIJAH**  
Pangkat : Penata  
NIP : 1980504 201409 2 002

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422  
<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SITTI ROHANA, SE**  
Jabatan : Analis Keuangan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. IDRUS, SH**  
Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

A. IDRUS, SH  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19700605 200501 1 026

Pihak Pertama,  
ANALIS KEUANGAN DAERAH,

  
SITTI ROHANA, SE  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19720609200701 2 013

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN**

| NO | SASARAN KINERJA   | INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 |
|----|---|---|--------------|-------------|
| 1  | 2   | 3   | 4            | 5           |
| 1  | <i>Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran</i>  | <i>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu</i> | 100%         | 100%        |
|    |   | <i>Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu</i>                       | 100%         | 100%        |
|    |   | <i>Persentase tertib ketatausahaan kantor</i>   | 76%          | 85%         |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu                                | 76%          | 100%        |
| 2  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah   | Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu   | 76%          | 100%        |
| 3  | Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja baik   | 100%         | 100%        |
| 4  | Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Tertib Administrasi Umum kantor  | 100%         | 100%        |
| 5  | Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD  | 100%         | 100%        |
| 6  | Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor   | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur              | 100%         | 100%        |
| 7  | Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik   | 93,76%       | 100%        |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                    | ANGGARAN         | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | <i>Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i> |                  |            |
| 1  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           | Rp 10.000.000    | APBD       |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | Rp 3.549.539.060 | APBD       |
| 3  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | Rp 311.086.883   | APBD       |
| 4  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan   | Rp 125.241.000   | APBD       |

# LAMPIRAN

|               |  |           |                      |             |
|---------------|--|-----------|----------------------|-------------|
| 5             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp        | 9.872.340            | APBD        |
| 6             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Rp        | 515.027.730          | APBD        |
| 7             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat        | Rp        | 9.430.830            | APBD        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>Rp</b> | <b>4.530.197.843</b> | <b>APBD</b> |

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**A. IDRUS, SH**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19700605 200501 1 026

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GUNAWANG, SP., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN  
DAN PENGENDALIAN PROGRAM,

**GUNAWANG, SP., M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19801224 200502 1 003

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

| NO  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024     |
|-----|---|---|--------------|-----------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)          | (5)             |
| 1   | <i>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</i>                  | <i>Percentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD</i>  | 100%         | 100%            |
|     |   | <i>Percentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD</i>  | 100%         | 100%            |
|     |   | <i>Percentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah</i>                                      | 97,96%       | 95%             |
| I   | <i>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</i>                       | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan  | 2 dokumen    | 3 dokumen       |
| 1   | Tersedianya dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)               | -            | 2 dokumen       |
| 2   | Tersedianya berita acara Konsultasi Publik  | Jumlah berita acara konsultasi publik   | 1 laporan    | 1 berita acara  |
| 3   | Tersedianya berita acara hasil Forum SKPD/Lintas SKPD   | Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah  | 1 laporan    | 26 berita acara |
| 4   | Tersedianya berita acara Musrenbang Kabupaten   | Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota   | 1 laporan    | 1 Berita Acara  |
| 5   | Tersedianya usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan  | Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan   | 1 laporan    | 404 usulan      |
| 6   | Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai standar dan tepat waktu                       | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                 | 2 dokumen    | 3 Dokumen       |
| II  | <i>Meningkatnya kualitas analisis dan pembinaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</i>   | <i>Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</i> | 1 laporan    | 1 laporan       |
| 7   | Terlaksananya pembinaan dalam pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD               | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | 1 Laporan    | 45 laporan      |
| III | <i>Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i> | <i>Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan</i>                 | 1 laporan    | 6 laporan       |

# LAMPIRAN

|    |   |  |                  |                  |
|----|---|--|------------------|------------------|
| 8  | Tersedianya laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (evaluasi RPJMD, RKPD) | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                  | 1 Laporan        | 2 laporan        |
| 9  | Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   | 4 Laporan        | 4 Laporan        |
| IV | <i>Meningkatnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>    | <i>Jumlah laporan hasil implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i> | <i>1 laporan</i> | <i>1 laporan</i> |
| 10 | Tersedianya data dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)                                    | Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola          | 1 Laporan        | 1 laporan        |

| NO  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | ANGGARAN              | KETERANGAN  |
|-----|--|-----------------------|-------------|
| 1   | Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                   | Rp 340.926.290        |             |
| I   | <i>Penyusunan, perencanaan dan pendanaan</i>   | <i>Rp 295.645.770</i> | <i>APBD</i> |
| 1   | Analisis kondisi daerah, 1 permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah                 | Rp 15.410.130         | APBD        |
| 2   | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Rp 5.550.060          | APBD        |
| 3   | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD  | Rp 7.629.120          | APBD        |
| 4   | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | Rp 48.466.310         | APBD        |
| 5   | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan  | Rp 8.951.460          | APBD        |
| 6   | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    | Rp 209.638.690        | APBD        |
| #   | <i>Analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</i> | <i>Rp 3.893.280</i>   | <i>APBD</i> |
| 7   | Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD                    | Rp 3.893.280          | APBD        |
| III | <i>Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</i>            | <i>Rp 35.004.200</i>  | <i>APBD</i> |
| 8   | Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota     | Rp 3.621.330          | APBD        |
| 9   | Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah           | Rp 31.382.870         | APBD        |

# LAMPIRAN

|           |  |           |                    |             |
|-----------|--|-----------|--------------------|-------------|
| <b>IV</b> | <i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>    | <b>Rp</b> | <b>6.383.040</b>   | <b>APBD</b> |
| 10        | Pengelolaan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Rp        | 6.383.040          | APBD        |
|           | <b>Jumlah</b>  | <b>Rp</b> | <b>340.926.290</b> |             |

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19750215 200502 1 002

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGENDALIAN PROGRAM,

**GUNAWANG, SP., M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19801224 200502 1 003

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JAMALUDDIN, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si.**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH,

**JAMALUDDIN, S.Sos.**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19780410 200701 1 012

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

| NO  | SASARAN PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 |
|-----|--|---|--------------|-------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)          | (5)         |
| 1   | <i>Meningkatnya kualitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</i>   | <i>Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah</i>  | 100%         | 100%        |
|     |  | <i>Persentase keselarasan kegiatan antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah</i>  | 100%         | 100%        |
|     |  | <i>Persentase konsistensi sub kegiatan antara RENJA dengan RKA pada Perangkat Daerah</i>                                    | 100%         | 100%        |
|     |  | <i>Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral</i>  | 99,29%       | 95%         |
| 1   | <i>Meningkatnya kualitas sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah</i>            | <i>Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah</i> | 100%         | 100%        |
| 1   | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 2   | Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang infrastruktur      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur             | 4 Laporan    | 4 Laporan   |
| 3   | Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur     | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 4   | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 5   | Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang kewilayahan        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan               | 4 Laporan    | 4 Laporan   |
| 6   | Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan   | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan       | 1 Laporan    | 1 Laporan   |

# LAMPIRAN

| 2 | Meningkatnya kualitas pengkajian dan kelitbang   | Percentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbang                                       | 90%       | 100%      |
|---|--|---|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya penelitian dan pengembangan Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Percentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan | 100%      | 100%      |
| 1 | Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman | Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman       | 1 dokumen | 1 dokumen |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN   | ANGGARAN       | KETERANGAN |
|----|--|----------------|------------|
| 1  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah   |                |            |
| 1  | Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan  | Rp 107.180.148 | APBD       |
| 1  | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur                           | Rp 2.634.276   | APBD       |
| 2  | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan                             | Rp 2.686.446   | APBD       |
| 3  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Rp 57.025.326  | APBD       |
| 4  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Rp 34.833.268  | APBD       |
| 5  | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur | Rp 7.853.502   | APBD       |
| 6  | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan   | Rp 7.468.052   | APBD       |

# LAMPIRAN

|   |   |                |      |
|---|---|----------------|------|
| 2 | <i>Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>                         |                |      |
| 1 | <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i> | Rp 109.610.000 | APBD |
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman      | Rp 109.610.000 | APBD |
|   | Jumlah  | Rp 216.790.148 | APBD |

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19750215 200502 1 002

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH,

**JAMALUDDIN, S.Sos**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP. 19780410 200701 1 012

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSDI, S.Sos., M.Adm.KP**

Jabatan : Kepala Bidang Sosial Dan Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA,

**RUSDI, S.Sos., M.Adm.KP**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19731231 200212 1 030

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA**

| NO | SASARAN PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 |
|----|--|---|--------------|-------------|
| 1  | 2  | 3   | 4            | 5           |
| 1  | <i>Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</i>   | <i>Persentase keselarasan program OPD pada bidang sosial budaya antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah</i>                | 100%         | 100%        |
|    |  | <i>Persentase keselarasan kegiatan OPD pada bidang sosial budaya antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah</i>                  | 100%         | 100%        |
|    |  | <i>Persentase konsistensi sub kegiatan OPD pada bidang sosial budaya antara RENJA dengan RKA pada Perangkat Daerah</i>          | 100%         | 100%        |
|    |  | <i>Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada bidang sosial budaya</i>                                      | 99,29%       | 95%         |
| 1  | Meningkatnya kualitas sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya  | Persentase kesesuaian Renstra/Rerja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang sosial budaya                                     | 100%         | 100%        |
| 1  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 2  | Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pemerintahan             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 3  | Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          | 4 Laporan    | 4 Laporan   |
| 4  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 5  | Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pembangunan manusia      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia           | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 6  | Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia   | 4 Laporan    | 4 Laporan   |

# LAMPIRAN

| <b>2</b>  | <b>Meningkatnya kualitas pengkajian dan kelitbangan</b>   | <b>Percentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan</b>   | <b>90%</b>  | <b>100%</b> |
|-----------|---|--|-------------|-------------|
| <i>I</i>  | <i>Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>        | <i>Percentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> |
| 1         | Tersedianya Data Kelitbangan dan Peraturan  | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik   | -           | 1 Laporan   |
| <i>II</i> | <i>Meningkatnya penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Budaya</i>  | <i>Percentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan</i>                               | <i>100%</i> | <i>100%</i> |
| 1         | Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | 1 dokumen   | 1 dokumen   |
| 2         | Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan  | Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan  | -           | 1 dokumen   |
| 3         | Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana                  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                | -           | 1 dokumen   |
| NO        | PROGRAM/KEGIATAN  | ANGGARAN   | KETERANGAN  |             |
| 1         | <i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>   |  |             |             |
| <i>I</i>  | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>   | Rp 115.998.934   | APBD        |             |
| 1         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Rp 29.577.222  | APBD        |             |
| 2         | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan                           | Rp 3.223.470   | APBD        |             |
| 3         | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan | Rp 5.340.260   | APBD        |             |
| 4         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Rp 70.074.012  | APBD        |             |
| 5         | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia                    | Rp 2.533.710   | APBD        |             |

# LAMPIRAN

|               |  |    |                    |             |
|---------------|--|----|--------------------|-------------|
| 6             | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia | Rp | 5.250.260          | APBD        |
| II            | <i>Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>  |    |                    |             |
| I             | <i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>  | Rp | 552.806.911        | APBD        |
| 1             | Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi  | Rp | 552.806.911        | APBD        |
| II            | <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan</i>  | Rp | 260.148.490        | APBD        |
| 1             | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek -Aspek Sosial   | Rp | 260.148.490        | APBD        |
| <b>Jumlah</b> |  | Rp | <b>928.954.335</b> | <b>APBD</b> |

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA,

RUSDI, S.Sos., M.Adm.KP  
Pangkat : Penata Tk.I  
NIP : 19731231 200212 1 030

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AKHMAD FARID, S.Pt**  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
KEPALA BALITBANGREN,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19750215 200502 1 002

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG EKONOMI,

**AKHMAD FARID, S.Pt**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19820727 200502 1 008

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BIDANG EKONOMI

| NO | SASARAN PROGRAM   | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 |
|----|---|--|--------------|-------------|
| 1  | 2   | 3  | 4            | 5           |
| 1  | <i>Meningkatnya kualitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</i>  | <i>Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah</i>                                       | 100%         | 100%        |
|    |   | <i>Persentase keselarasan kegiatan antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah</i>   | 100%         | 100%        |
|    |   | <i>Persentase konsistensi sub kegiatan antara RENJA dengan RKA pada Perangkat Daerah</i>                                 | 100%         | 100%        |
|    |   | <i>Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral</i>   | 99,29%       | 95%         |
| 1  | <i>Meningkatnya kualitas sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Ekonomi</i>  | <i>Persentase kesesuaian Renstra/Rerja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang ekonomi</i>                             | 100%         | 100%        |
| 1  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 2  | Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang perekonomian      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian           | 4 Laporan    | 4 Laporan   |
| 3  | Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian   | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 4  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | 1 Laporan    | 1 Laporan   |
| 5  | Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang SDA               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                    | 4 Laporan    | 4 Laporan   |
| 6  | Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA          | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA            | 1 Laporan    | 1 Laporan   |

# LAMPIRAN

| NO     | PROGRAM/KEGIATAN  | ANGGARAN      | KETERANGAN |
|--------|---|---------------|------------|
| 1      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |               |            |
| 1      | Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)   | Rp 84.146.662 | APBD       |
| 1      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan   |               |            |
| 1      | Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Rp 48.546.442 | APBD       |
| 2      | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian                           | Rp 2.783.460  | APBD       |
| 3      | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian | Rp 4.395.720  | APBD       |
| 4      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan   |               |            |
| 4      | Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | Rp 19.000.800 | APBD       |
| 5      | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA                                    | Rp 4.710.120  | APBD       |
| 6      | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA          | Rp 4.710.120  | APBD       |
| Jumlah |   | Rp 84.146.662 |            |

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG EKONOMI,

AKHMAD FARID, S.Pt

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon: 0428-21120 Faks: 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Nur Anidah, SP**  
Jabatan : Kepala UPTD Agro Techno Park

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penelitian  
Pengembangan dan Perencanaan,

**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala UPTD Agro Techno Park,

**Nur Anidah, SP**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19771123 200801 1 017

# LAMPIRAN

## Pohon Kinerja Tahun 2024



# LAMPIRAN



# LAMPIRAN

## Sasaran 3

### Indikator 1



# LAMPIRAN



## Tujuan Renstra

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern

| Indikator                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Reformasi Birokrasi | 58,02 | 63,18 | 64,37 | 65,56 | 66,75 | 67,95 |

## Sasaran 1 Renstra

### Indikator Sasaran

Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Dasper

Indikator : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai Standar dan Tepat Waktu

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|
| 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

Persentase Keselarasan Program antara RPJMD dengan RKPD Perangkat Daerah

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Keselarasan program antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



### Kegiatan

#### Sub Kegiatan

Meningkatnya kualitas dokumentasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah

Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah

Pelaksanaan Konsultasi Publik

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan

Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD

Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota

Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Pengelolaan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian

## Tujuan Renstra

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern

| Indikator                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Reformasi Birokrasi | 58,02 | 63,18 | 64,37 | 65,56 | 66,75 | 67,95 |

## Sasaran 2 Renstra

### Indikator Sasaran

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

| Indikator : Indeks Inovasi Daerah |      |       |       |       |       |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 2019                              | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| -                                 | -    | 35,91 | 43,26 | 41,64 | 45,32 |

### Sasaran Strategis

| Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya                     | Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan pengembangan | Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan              | Meningkatnya kualitas kajian dan kelitbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang bernilai inovasi |
|---|--|---|---|
| Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kedudukan yang di manfaatkan | Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya | Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangannya  |

### Program

Penelitian dan Pengembangan Daerah

| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi danPembangunan                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi danPembangunan              | Pengembangan Inovasi dan Teknologi  |
|--|---|--|---|
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 1 Laporan | Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD 1 Laporan | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Laporan | Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Laporan |

### Kegiatan

#### Sub Kegiatan

## Tujuan Renstra

### Sasaran 3

#### Renstra

#### Indikator Sasaran

### Sasaran Strategis

### Program

### Kegiatan

| Sub Kegiatan   |             | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|--|-------------|------------------------------------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3 Paket     |                                    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 8 Paket     |                                    |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 3 Paket     |                                    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 2 Paket     |                                    |
| Penyediaan Bahan/Material  | 24 Paket    |                                    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 378 Laporan |                                    |

| Sub Kegiatan  |            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|---|------------|--|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 1060 Surat |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2 Laporan  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 1 Laporan  |  |

| Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indikator  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Indeks Reformasi Birokrasi                                 | 58,02 | 63,18 | 64,37 | 65,56 | 66,75 | 67,95 |

| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah                              |       |       |       |                                 |       |       |       |  |      |      |      |
|--|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|------|------|------|
| Indeks Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah  |       |       |       | Predikat SAKIP Perangkat Daerah |       |       |       | Presentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |      |      |      |
| 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                            | 2021  | 2022  | 2024  | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |
| 87,42  | 86,33 | 88,84 | 86,33 | 82,36                           | 83,64 | 83,59 | 85,12 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran  |       |       |       |                                 |       |       |       |  |      |      |      |
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |       |       |       |                                 |       |       |       |  |      |      |      |
| Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |       |       |       |                                 |       |       |       |  |      |      |      |

| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah waktu | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |
|--|---|--|---|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 1 Laporan   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                             | 36 Orang  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 Laporan  | 1 Laporan   |
| Penyediaan Bahan/Material  | 2 Unit  | 7 Unit   |   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 3 Paket  |   |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 1 Gedung   |   |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 2 Unit   |   |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |   |

# LAMPIRAN

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 5.472.427.548,07,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.051.586.906,- anggaran tersebut direalisasikan ke seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan sebagai berikut :

## Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

| Program  | Alokasi (RP)     | Realisasi (RP) |
|--|------------------|----------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN</b>  | 3.511.878.216    | 3.399.262.907  |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | 311.086.883      | 309.055.083    |
| 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 5.036.625        | 5.036.625      |
| 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 35.575.032       | 35.575.032     |
| 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 7.957.657        | 7.957.657      |
| 4. Penyediaan Bahan/Material   | 12.307.569       | 12.307.569     |
| 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 249.233.200      | 247.298.200    |
| 6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 976.800          | 880.000        |
| <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | 515.027.730      | 462.291.183    |
| 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 516.150          | 0              |
| 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 4.500.000        | 508.783        |
| 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 510.011.580      | 461.782.400    |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | 125.241.000      | 124.390.395    |
| 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 94.394.000       | 93.607.995     |
| 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 797.000          | 732.400        |
| 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 8.690.000        | 8.690.000      |
| 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 21.360.000       | 21.360.000     |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | 9.872.340        | 9.300.000      |
| 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 9.872.340        | 9.300.000      |
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                       | 9.430.830        | 8.853.000      |
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5.623.530        | 5.423.000      |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD  | 2.978.130        | 2.683.000      |
| 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 829.170          | 747.000        |
| <b>Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah</b>  | 2.541.219.433,20 | 2.485.373.246  |
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.537.643.643,2  | 2.481.884.246  |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 3.575.790        | 3.489.000      |

# LAMPIRAN

| Program   | Alokasi (RP) | Realisasi (RP) |
|---|--------------|----------------|
| <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>  | 335.797.221  | 306.695.555    |
| <b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | 290.516.700  | 277.030.555    |
| 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah  | 11.586.060   | 10.250.740     |
| 2. Pelaksanaan Konsultasi Publik  | 5.550.060    | 5.528.220      |
| 3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  | 7.629.120    | 7542.000       |
| 4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | 48.466.310   | 48.321.000     |
| 5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan  | 8.951.460    | 3.381.000      |
| 6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 208.333.690  | 202.007.105    |
| <b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                         | 3.893.280    | 3.782.400      |
| 1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                      | 3.893.280    | 3.782.400      |
| <b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                    | 35.004.200   | 22.409.090     |
| 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                   | 3.621.330    | 3.059.090      |
| 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah   | 31.382.870   | 19.350.000     |
| <b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>                                | 6.383.040    | 3.474.000      |
| 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                   | 6.383.040    | 3.474.000      |
| <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | 554.752.434  | 449.504.457    |
| <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>  | 389.736.841  | 300.803.490    |
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RKPD                     | 28.149.371   | 25.843.200     |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 675.000      | 0              |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 300.791.638  | 225.892.514    |
| 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD              | 52.395.692   | 46.659.776     |
| 5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 2.474.880    | 2.408.000      |
| 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 5.250.260    | 0              |

# LAMPIRAN

| Program   | Alokasi (RP)            | Realisasi (RP)       |
|---|-------------------------|----------------------|
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)</b>  | 74.253.444              | 68.230.392           |
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD               | 29.591.042              | 29.315.292           |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                            | 803.640                 | 724.000              |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | 2.545.720               | 852.000              |
| 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD                        | 33.819.462              | 31.896.100           |
| 5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | 2.783.460               | 2.011.000            |
| 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 4.710.120               | 3.432.000            |
| <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   | 90.762.149              | 80.470.575           |
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD, RPJMD dan RKPD              | 9.695.326               | 45.728.261           |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 2.350.156               | 2.101.600            |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3.383.502               | 3.263.200            |
| 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan RPJPD, RPJMD dan RKPD                | 28.092.293              | 22.942.514           |
| 5. +Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                            | 2.666.022               | 2.030.000            |
| 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 4.574.850               | 4.405.000            |
| <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>   | 1.069.999.675,97        | 896.123.987          |
| <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>  | 260.148.490             | 197.655.616          |
| 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial   | 260.148.490             | 197.655.616          |
| <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>  | 257.044.274             | 244.215.815          |
| 1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | 147.434.240             | 135.078.350          |
| 2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman   | 109.610.280             | 109.137.465          |
| <b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | 552.806.911             | 454.252.556          |
| 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi   | 552.806.911             | 454.252.556          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.472.427.548,07</b> | <b>5.051.586.906</b> |

# Monitoring dan Evaluasi Renja Tahun 2024

## Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

102

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ketiahan (output) dan Sub Kegiatan   | Target Kinerja dan Anggaran Renja/Dpa Perangkat Daerah Tahun Berjalan (1 Tahun 2023) |                  |           |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |             |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 |              |
|----|--|--|--|------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--------------|
|    |  |  | 1  | II               | III       | IV          | K                               | Rp          | K           | Rp          | K   | Rp   |              |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                | 6         | 7           | 8                               |             |             |             |   |  | 9=(5+6+7+8)  |
|    |  |  | K  | Rp               | K         | Rp          | K                               | Rp          | K           | Rp          | K   | Rp   | 10=9/4 x 100 |
|    |  |  |  |                  |           |             |                                 |             |             |             |   |  | %Rp          |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | Percentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu                        | 100%   | 3.511.878.549    | 0%        | 786.399.552 | 1.048.911.914                   |             |             |             | 3.399.262.907   | 95   | 96,79        |
|    |  | Percentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu   | 100%   |                  | 0%        |             |                                 |             |             |             |   | 95   | 96,79        |
|    |  | Percentase tertib ketatausahaan kantor   | 85%  |                  | 0%        |             |                                 |             |             |             |   | 95   | 96,79        |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Percentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu   |  |                  |           | 1.270.000   |                                 |             | 0           | 6.836.000   | 0   | 8.853.000  | 100,00       |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen  | 5.623.530        | 0 Dokumen |             | 0                               |             | 1           | 4.153.000   | 2 Dokumen   | 5.423.000  | 100,00       |
|    | Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                        | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                   | 2 Dokumen  | 2.978.130        | 0 Dokumen |             | 1.270.000                       |             | 1           | 2.683.000   | 2 Dokumen   | 2.683.000  | 100,00       |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan  | 829.170          | 1 Laporan |             |                                 |             |             | 1 laporan   | 747.000   | 100,00   | 90,09        |
|    | Keuangan Perangkat Daerah  | Percentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu  | 100  | 2.541.219.766    | 0         | 534.173.084 | 0                               | 894.617.785 | 526.467.963 | 0           | 530.114.414   | 2.85.373.246   | 100,00       |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 36 Orang   | 2.537.643.976,20 | 36 Orang  | 534.173.084 | 894.617.785                     | 526.467.963 | 526.467.963 | 526.467.963 | 2.481.884.246   | 100,00   | 97,80        |
|    | Kordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 2 Laboran  | 3.575.790        |           |             |                                 |             |             |             | 3.489.000   | 2 laporan  | 3.489.000    |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Percentase tertib Administasi Umum Kantor  | 100%   | 31.086.883       | 0         | 39.174.068  | 0                               | 96.906.129  | 15,60       | 48.517.410  | 40,01   | 129.459.476  | 75           |
|    | Penyediaan Komponen Instansi/Lokasi/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen instalasi/listik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan                                  | 5 Paket  | 5.036.625        |           |             | 5 Paket                         | 5.036.625   |             | 5 Paket     | 5.036.625   | 100,00   | 100          |

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN

| No  | Program/Kegiatan/Su<br>bkegiatan  | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan Output<br>dan Sub Kegiatan | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                 |            |       |            |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah yang<br>Dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah yang<br>Dievaluasi | Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Perangkat<br>Daerah Tahun 2024 |        |       |
|---|---|--|---------------------------------|----------------|----|-----------------|------------|-------|------------|-------|---|---|--|--------|-------|
|   |   |  | I                               |                | II |                 | III        |       | IV         |       |   |   |  |        |       |
| 1   | 2   | 3  | 4                               | 5              | 6  | 7               | 8          | K     | Rp         | K     | Rp  | K   | Rp   | K      | Rp    |
|   |   |  |                                 |                |    |                 |            |       |            |       |   |   |  |        |       |
| Pelaksanaan<br>Konsultasi Publik  | Jumlah Berita Acara Konsultasi<br>Publik  | 1 Berita Acara   | 5.550.060                       | 1 Berita Acara | -  | 0,00            | -          | 0,00  | -          | 99,61 | 5.528.220   | 1 Berita Acara  | 5.528.220  | 100,00 | 99,61 |
| Koordinasi<br>Pekerjaan Forum<br>SKPD/Lintas PD   | Jumlah Berita Acara Forum<br>Perangkat<br>Daerah/Lintas Perangkat Daerah  | 26 Berita Acara  | 7.629.120                       | 0 berita acara | -  | 26 Berita Acara | -          | 88,48 | 6.750.000  | 10,38 | 792.000   | 26 Berita Acara   | 7.542.000  | 100,00 | 98,86 |
| Pelaksanaan<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Berita Acara<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota   | 1 Berita Acara   | 48.466.310                      | 0 berita acara | -  | 1 Berita Acara  | 4.000.000  | 48,80 | 23.650.000 | 42,65 | 20.671.000  | 1 Berita Acara  | 48.321.000   | 100,00 | 99,70 |
| Penyiapan<br>Bahan<br>Musrenbang<br>Kecamatan   | Jumlah Usulan yang<br>Terverifikasi oleh<br>Kecamatan   | 515 usulan   | 8.951.460                       | 515 usulan     | -  | 0,00            | 2.195.000  | 0,00  | -          | 13,25 | 1.186.000   | 515 usulan  | 3.381.000  | 100,00 | 37,77 |
| Koordinasi<br>Penyusunan dan<br>Penetapan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah/kota yang<br>Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKD)                     | 3 dokumen  | 208.333.690                     | 0 dokumen      | -  | 1 dokumen       | 23.228.200 | 1,71  | 3.558.500  | 84,11 | 175.220.405   | 3 dokumen   | 202.007.105  | 100,00 | 96,96 |
| Analisis Data dan<br>Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>Bidang Perencanaan<br>Pembangunan Daerah | Jumlah laporan hasil analisis<br>data dan informasi pemerintah<br>daerah bidang perencanaan<br>pembangunan daerah | 1 laporan  | 3.893.280                       | 0 laporan      | -  | 0 laporan       | 2.774.400  | 0,00  | -          | 25,89 | 1.008.000   | 0 laporan   | 3.782.400  | 100,00 | 97,15 |
| Pembinaan dan<br>Pemanfaatan Data<br>dalam Perencanaan<br>Pembangunan PD                          | Jumlah Orang yang Dibina<br>Data dan Informasi  | 45 Orang   | 3.893.280                       | 0 Orang        | -  | 45 Orang        | 2.774.400  | 0,00  | -          | 25,89 | 1.008.000   | 45 Orang  | 3.782.400  | 100,00 | 97,15 |
| Pengendalian,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan Bidang<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah            | Jumlah laporan hasil<br>pengendalian, evaluasi dan<br>pelaporan bidang perencanaan<br>pembangunan                 | 5 laporan  | 35.004.201                      | 1 laporan      | -  | 1 laporan       | -          | 38,70 | 13.546.400 | 25,32 | 8.862.690   | 1 laporan   | 22.409.090   | 100,00 | 64,02 |
| Koordinasi<br>Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pembangunan<br>di Kabupaten/Kota                 | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan Pelaksanaan<br>Perencanaan dan<br>Pembangunan                            | 1 laporan  | 3.621.330                       | 1 dokumen      | -  | 1 Dokumen       | -          | 63,41 | 2.296.400  | 21,06 | 762.590   | 1 laporan   | 3.059.090  | 100,00 | 84,47 |

# LAMPIRAN

| No | Program/Kegiatan/Su bkegiatan                                     | Indikator Kinerja/Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan   |           |            |           |      |           |      |       |            |       |           |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dilevahasi |        |       |  |
|----|---|---|---|-----------|------------|-----------|------|-----------|------|-------|------------|-------|-----------|-----------|---|--------|-------|--|
|    |   |   | I   |           |            |           | II   |           |      |       | III        |       |           |           | IV  |        |       |  |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5         | 6          | 7         | 8    | 9         | 10   | 11    | 12         | 13    | 14        | 15        | 16  | 17     | 18    |  |
|    |   |   | K   | Rp        | K          | Rp        | K    | Rp        | K    | Rp    | K          | Rp    | K         | Rp        | K   | Rp     | K     |  |
|    |   |   |   |           |            |           |      |           |      |       |            |       |           |           |   |        |       |  |
|    |   | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  | 4 laporan | 31.382.871 | 1 laporan | -    | 1 laporan | -    | 35.85 | 11.250.000 | 25.81 | 8.100.000 | 4 laporan | 19.350.000  | 100.00 | 61.66 |  |
|    |   | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah  | Jumlah laporan hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 laporan | 6.383.040  | 1 laporan | -    | 1 laporan | -    | 0,00  | -          | 54,43 | 3.474.000 | 1 laporan | 3.474.000   | 100.00 | 54,43 |  |
|    |   | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah  | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang Dikelola                                | 1 dokumen | 6.383.040  | 0 dokumen | -    | 0 dokumen | -    | 0,00  | -          | 54,43 | 3.474.000 | 1 dokumen | 3.474.000   | 100.00 | 54,43 |  |
| 3  | Program Koordinasi dan Sinkroniasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Percentase dokument perencanaan sektor al bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya yang ditetapkan sesuai standar                       | 20%   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 89        |   | 81,03  |       |  |
|    |   | Percentase keselarasan program/Renstra pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang ekonomi, bidang sosial budaya antara :- RPMD dengan RENSTRA dan - RKPD dengan RENJA |   |           |            |           |      |           |      |       |            |       |           |           |   |        |       |  |
|    |   |   |   |           |            |           |      |           |      |       |            |       |           |           |   |        |       |  |
|    |   | Percentase Konsistensi kegiatan OPD antara RENJA dengan RKPA pada bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya                              | 100%  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 89  |        | 81,03 |  |
|    |   |   |   |           |            |           |      |           |      |       |            |       |           |           |   |        |       |  |
|    |   | Percentase rata-rata capaian program perencanaan sektor, pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang ekonomi dan bidang sosial budaya                                  | 100%  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 89  |        | 81,03 |  |
|    |   | Percentase rata-rata capaian program perencanaan sektor, pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang ekonomi dan bidang sosial budaya                                  | 95%   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 89  |        | 81,03 |  |

# LAMPIRAN

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |           |   |           |            |       |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Berangkat Daerah Tahun (Tahun 2023) yang Dievaluasi | Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 |           |             |        |       |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|------------|-------|------------|--|--|-----------|-------------|--------|-------|
|    |   |  | I                               |             | II        |   | III       |            | IV    |            |  |  |           |             |        |       |
| 1  | 2   | 3  | 4                               | 5           | 6         | 7 | 8         | K          | Rp    | K          | Rp   | K  | Rp        | K           | Rp     |       |
|    |   |  |                                 |             |           |   |           |            |       |            |  |  |           |             |        |       |
|    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia   | Percentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RJPMD/RKPd pembangunan manusia                               | 100%                            | 389.736.841 | 0,00      | - | 0,00      | 35.841.876 | 4,75  | 18.495.400 | 63,24  | 246.466.214  | 0,00      | 300.803.490 | 67     | 77,18 |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Bidang Pemerintahan (RJPBD, RPIMD dan RKPD)                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RJPBD, RPIMD dan RKPD) | 4 dokumen                       | 28.149.371  | 0 dokumen | - | 2 dokumen | 16.283.000 | 15,79 | 4.445.200  | 18,17  | 5.115.000  | 4 dokumen | 25.843.200  | 100,00 | 91,81 |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perangkat daerah Bidang Pemerintahan                                   | 1 laporan                       | 675.000     | 0 laporan | - | 0,00      | -          | 0,00  | -          | 0,00   | -  | 1 laporan | -           | 0      | 0     |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 4 laporan                       | 300.791.638 | 1 laporan | - | 1 laporan | -          | 4,67  | 14.050.200 | 70,43  | 211.842.314  | 4 laporan | 225.892.514 | 100,00 | 75,10 |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bidang Pembangunan Manusia (RJPBD, RPIMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RJPBD, RPIMD dan RKPD)                    | 1 dokumen                       | 52.395.692  | 0 dokumen | - | 0 dokumen | 19.558.876 | 0,00  | -          | 51,72  | 27.100.900   | 1 dokumen | 46.659.776  | 100,00 | 89,05 |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia                                    | Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pembangunan manusia    | 1 laporan                       | 2.474.880   | 0 laporan | - | 1 laporan | -          | 0,00  | -          | 97,30  | 2.408.000  | 1 laporan | 2.408.000   | 100,00 | 97,30 |

# LAMPIRAN

| No | Program/Kegiatan/Su bkegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub kegiatan  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan   |            |           |     |           |            |       |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja/Renstra Daerah yang Dilevaluasi | Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 |           |            |
|----|--|---|---|------------|-----------|-----|-----------|------------|-------|------------|--|--|-----------|------------|
|    |  |   | Target Kinerja dan Anggaran Renja/DRA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dilevaluasi | I          | II        | III | IV        | 1          | 2     | 3          | 4  |  |           |            |
| 1  | 2  | 3   | K   | Rp         | K         | Rp  | K         | Rp         | K     | Rp         | K  | Rp   | K         | %Rp        |
|    |  |   |   |            |           |     |           |            |       |            |  |  |           |            |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusuna Perangkat/Renja/Bidang Pembangunan Manusia | 4 laporan   | 5.250.260  | 1 laporan | -   | 1 laporan | -          | 0,00  | -          | 0,00   | -  | 4 laporan | 0,00       |
|    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  | Percentase kesesuaian Rencra/Renja/Perangkat bidang perekonomian dan SDA  | 100%  | 74.253.444 | 0,00      | -   | 0,00      | 28.982.100 | 0,00  | -          | 0,00   | -  | 0%        | 68.230.392 |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Di koordinir Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah yang Di koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                       | 1 dokumen   | 29.591.042 | 0 dokumen | -   | 1 dokumen | 8.832.100  | 53,83 | 15.928.192 | 15,39  | 4.555.000  | 1 dokumen | 29.315.292 |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian  | Jumlah laporan hasil Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian              | 1 laporan   | 803.640    | 0 laporan | -   | 1 laporan | -          | 0,00  | C,00       | 1 laporan  | 724.000  | 100,00    | 90,09      |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian                            | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatka Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusuna Renstra/Renja/Bidang Perekonomian           | 4 laporan   | 2.545.720  | 1 laporan | -   | 1 laporan | -          | 0,00  | -          | 0,00   | -  | 4 laporan | 832.000    |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (yang Di koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)               | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (yang Di koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | 1 dokumen   | 33.819.462 | 0 dokumen | -   | 1 dokumen | 20.150.000 | 10,20 | 3.448.000  | 24,54  | 8.298.100  | 1 dokumen | 31.896.100 |
|    |  |   |   |            |           |     |           |            |       |            |  |  |           |            |

# LAMPIRAN

| No | Program/Kegiatan/Su<br>bjekgiatan   | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan (output)<br>dan Sub Kegiatan   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |           |    |           |            |      |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah yang<br>Dievaluasi | Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Perangkat<br>Daerah Tahun 2024 |            |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|-----------|----|-----------|------------|------|------------|---|--|------------|
|    |   |  | I                               | II           | III       | IV | 5         | 6          | 7    | 8          | 9-(5+6+7+8)   |  |            |
| 1  | 2   | 3  | 4                               | 5            | 6         | 7  | 8         |            |      |            | 9-(5+6+7+8)   | 10-9/4 x 100   |            |
|    |   | K  | Rp                              | K            | Rp        | K  | Rp        | K          | Rp   | K          | Rp  | K  | %Rp        |
|    | Asistensi Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang SDA  | Jumlah laporan hasil Asistensi<br>Penyusunan dokumen<br>perencanaan pembangunan<br>perangkat daerah Bidang SDA                       | 1 laporan                       | 2.783.460    | 0 laporan | -  | 1 laporan | -          | 0,00 | -          | 0,00  | 1 laporan  | 72,25      |
|    | Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang SDA                           | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Mendapatkan Monitoring dan<br>Evaluasi dalam Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang SDA                  | 4 laporan                       | 4.710.120    | 1 laporan | -  | 1 laporan | -          | 0,00 | -          | 0,00  | 4 laporan  | 72,86      |
|    | koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan  | Percentase kesesuaian<br>Renstra/Renja perangkat<br>daerah dengan RJPBD<br>bidang infrastruktur dan<br>kewilayahannya                | 100%                            | 90.762.150   | 0,00      | -  | 0,00      | 30.540.825 | 0,00 | 14.908.200 | 0,00  | 35.021.550   | 100,00     |
|    | Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Infrastruktur (RJPBD<br>RPMD dan RKPBD)                      | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Infrastruktur yang Dikoordinir<br>Penyusunannya(RJPBD, RPMD<br>dan RKPBD) | 1 dokumen                       | 49.695.326   | 0 dokumen | -  | 1 dokumen | 17.307.001 | 0,00 | 12.806.600 | 0,00  | 15.614.660   | 1 dokumen  |
|    | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Infrastruktur   | Jumlah laporan hasil Asistensi<br>Penyusunan dokumen<br>perencanaan pembangunan<br>perangkat daerah Bidang<br>Infrastruktur          | 1 laporan                       | 2.350.156,80 | 0 laporan | -  | 1 laporan | -          | 0,00 | 2.101.600  | 0,00  | 1 laporan  | 89,42      |
|    | Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Infrastruktur                 | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Mendapat Monitoring dan<br>Evaluasi dalam Penyusuna<br>Renstra/Renja Bidang<br>Infrastruktur         | 4 laporan                       | 3.383.502    | 1 laporan | -  | 1 laporan | -          | 0,00 | 3.263.200  | 0,00  | 4 laporan  | 96,44      |
|    | Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang Kewilayah<br>yang Dikoordinir<br>Kewilayahannya(RJPBD, RPMD<br>dan RKPBD) | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Kewilayah<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya(RJPBD, RPMD<br>dan RKPBD)  | 1 dokumen                       | 28.092.293   | 0 dokumen | -  | 1 dokumen | 13.233.824 | 0,00 | 0,00       | 9.708.690   | 1 dokumen  | 22.942.514 |
|    |   |  |                                 |              |           |    |           |            |      |            |   |  | 81,67      |

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN

## Laporan Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024 Badan Penelitian Penembangan dan Perencanaan



### PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jalan Pameran Link. Batu-Batu Kelurahan Darma Kecamatan Polewali  
Kabupaten Polewali Mandar, Kode Pos 91314

Email:[Inspektorat@polmankab.go.id](mailto:Inspektorat@polmankab.go.id). Website : [Inspektorat.Polmankab.go.id](http://Inspektorat.Polmankab.go.id)

Polewali, 11 Juni 2024

Nomor : 047.7/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD  
Tahun 2023

Kepada

Yth. **Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan  
Kabupaten Polewali Mandar**  
di –  
Polewali

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, dengan tujuan:
  - a. Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah;
  - b. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem AKIP;
  - c. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

# LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, memperoleh nilai **85,12** atau memperoleh predikat rating "A" (Memuaskan). Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

| Komponen Yang Dinilai                | 2023       |              | 2022       |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                      | Bobot      | Nilai        | Bobot      | Nilai        |
| a. Perencanaan Kinerja               | 30         | 29,75        | 30         | 29,70        |
| b. Pengukuran Kinerja                | 25         | 22,81        | 25         | 22,81        |
| c. Pelaporan Kinerja                 | 15         | 12,09        | 15         | 11,78        |
| d. Evaluasi Internal                 | 10         | 6,48         | 10         | 6,85         |
| e. Capaian Kinerja                   | 20         | 14,00        | 20         | 12,50        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          | <b>100</b> | <b>85,12</b> | <b>100</b> | <b>83,64</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |            | <b>A</b>     |            | <b>A</b>     |

4. Nilai sebagai mana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perencanaan Kinerja telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dilevel kabupaten ke level OPD sampai ke level atasan dan bawahan (eselon III dan IV). Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019-2024) dengan memuat sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Namun untuk menghasilkan perencanaan strategis yang lebih baik lagi perlu dilakukan monitoring target jangka menengah setiap tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.

# LAMPIRAN

- 2) Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV. Selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi manajemen kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

c. Pelaporan Kinerja

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan yang menggambarkan capaian-capaihan kinerja outcome atau output penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan hasil evaluasi dan analisis terkait capaian-capaihan kinerja outcome atau output, melainkan hanya proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA)
- 2) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan sehingga tidak dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja
- 3) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya hanya sebatas informasi tentang upaya efisiensi yang telah dilakukan.
- 4) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- 5) Pemanfaatan informasi kinerja juga belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.

# LAMPIRAN

## d. Evaluasi Internal

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Namun evaluasi yang dilaksanakan sebatas hanya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam periodic semesteran adapun hasil evaluasi yang telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan belum ada kesepakatan untuk menindaklanjuti.

## e. Capaian Kinerja

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah mencapai target output dan outcome yang baik dan dapat mempertahankan capaian tahun sebelumnya, dengan sumber data yang sudah mendekati kriteria yang ditetapkan. Dari output dan outcome yang dilaporkan menunjukkan bahwa Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan telah mencapai hasil yang cukup memadai walaupun belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi capaian-capaihan indikator outcome yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas serta dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP, maka kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar direkomendasikan agar melakukan upaya perbaikan untuk setiap komponen, sub-komponen AKIP pada Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Lakukan monitoring secara berkala dan menindaklanjutinya terhadap pencapaian atas Target jangka menengah dalam Renstra setiap tahun berjalan
  - b. Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih baik.
  - c. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan.
  - d. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
  - e. Menguatkan komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik

# LAMPIRAN

berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

- f. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Pimpinan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**BALITBANGREN**  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN



bappedalitbang@polmankab.go.id



Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Mandar